



# **MODUL EKONOMI KOPERASI**

**DISUSUN OLEH:**

**RIPHO DELZY PERKASA, M.Pd**



**PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**2020**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga Penulis dapat menyelesaikan Modul Ekonomi Koperasi.

Selanjutnya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan makalah ini, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu sampai Modul ini dapat diselesaikan.

Dalam menyusun Modul ini, tentu masih terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik bahasa maupun kalimatnya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan pada Modul ini.

Akhir kata Penulis sampaikan, semoga Modul Ekonomi Koperasi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Ekonomi Koperasi.

Medan, April 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENGERTIAN KOPERASI, LATAR BELAKANG DAN SEJARAH TIMBULNYA KOPERASI.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Koperasi.....	1
B. Pengertian Koperasi di Indonesia.....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Sejarah Timbulnya Koperasi di Dunia .....	3
E. Koperasi Sebagai Suatu Sistem.....	7
F. Dampak Revolusi Industri Terhadap Pemikiran Koperasi .....	9
<b>BAB II GERAKAN KOPERASI DI INDONESIA .....</b>	<b>11</b>
A. Gerakan Koperasi di Indonesia .....	11
B. Hubungan Dekopin dengan Koperasi di Luar Negeri .....	15
C. Sikap Pemerintah Terhadap Gerakan Koperasi .....	15
<b>BAB III TUJUAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI .....</b>	<b>21</b>
A. Tujuan.....	21
B. Asas .....	24
C. Prinsip .....	28
<b>BAB IV FUNGSI DAN PENGGOLONGAN KOPERASI .....</b>	<b>33</b>
A. Fungsi dan Peran Koperasi .....	33
B. Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial .....	34
C. Penggolongan Koperasi .....	35
<b>BAB V PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI.....</b>	<b>40</b>
A. Pengertian Koperasi.....	40
B. Latar Belakang Pendirian Koperasi.....	40
C. Langkah-Langkah Pendirian Koperasi .....	43

D. Keanggotaan Koperasi.....	45
E. Pembubaran Koperasi.....	50
<b>BAB VI ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI .....</b>	<b>53</b>
A. Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi.....	53
B. Hubungan Kerja, Pengawas, dan Manajer Koperasi .....	62
<b>BAB VII PERANAN MANAJEMEN DI BIDANG KOPERASI .....</b>	<b>64</b>
A. Pengertian Manajemen Koperasi.....	64
B. Prinsip Manajemen Koperasi .....	68
C. Peranan Manajemen Dalam Koperasi .....	69
D. Pentingnya Manajemen Koperasi.....	72
E. Tataunan Manajemen Koperasi.....	74
<b>BAB VIII DUKUNGAN MANAJEMEN TERHADAP KOPERASI.....</b>	<b>76</b>
A. Dukungan Anggota Terhadap Koperasi.....	76
B. Konsekuensi Manajemen Terhadap Koperasi.....	82
C. Masalah Anggota Dalam Manajemen Koperasi.....	84
D. Manusia Sebagai Salah Satu Unsur Penting Dalam Manajemen.....	88
E. Manajemen Untuk Meningkatkan Kesejahteraan.....	90
<b>BAB XI PERMODALAN DAN PERHITUNGAN SHU KOPERASI.....</b>	<b>92</b>
A. Pengertian, Unsur Pengertian dan Jenis Koperasi.....	92
B. Permodalan Koperasi.....	100
C. Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>

## BAB I

### PENGERTIAN KOPERASI, LATAR BELAKANG DAN SEJARAH TIMBULNYA KOPERASI DUNIA

#### A. Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud dengan Koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan. Adapun Definisi Koperasi menurut para ahli :

1. Muhammad Hatta (1994) : Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.
2. ILO (dikutip oleh Edilius & Sudarsono, 1993) : Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.
3. Dr. G. Mladenata, di dalam bukunya "*Histoire Desdactrines Cooperative*" mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan anggota.
4. H. E. Erdman, dalam bukunya "*passing monopoly as an aim of cooperative*" bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan

Bila dirinci dari definisi tersebut, maka beberapa pokok pemikiran sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
2. Melayani anggota yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
3. Bentuk kerjasama di dalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela.
4. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
5. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi.
6. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

## **B. Pengertian Koperasi di Indonesia**

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “ *perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asaskekeluargaan*” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan* “, sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah :

*“Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan,”.*

Tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25/1992 adalah sebagai berikut :

*“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pnacasila dan UUD 1945”.*

Dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan

anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Penjabaran lebih rinci mengenai pengertian koperasi Indonesia sebagaimana dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya.
2. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan.
3. Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan.
4. Koperasi menjunjung atas asas demokrasi.
5. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan.

### **C. Latar Belakang**

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di kampung rochdale. Namun, sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadi Revolusi Industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah, terutama buruh yang penghasilannya sangat kecil. Gerakan ini bertujuan untuk memecahkan persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya semakin lemah. Setelah berkembang di Inggris Koperasi menyebar ke berbagai Negara baik di Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk ke Indonesia. Koperasi sebenarnya telah masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke XIX Yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya. Dalam perkembangan koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memecahkan kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya.

### **D. Sejarah Timbulnya Koperasi di Dunia**

Gerakan koperasi di dunia, di mulai pada peretengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga ini sering disebut dengan “ KOPERASI PRAINDUSTRI”. Dari sejarah perkembangannya, dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang

berdampak pada semakin besarnya pengangguran hingga revolusi Perancis tahun 1789 yang awalnya ingin menumbangkan kekuasaan raja yang feodalistik, ternyata munculnya hegemoni baru kaum kapitalis.

Semboyan *Liberte-Egaliste-Fraternite* (kebebasan-persamaan-kebersamaan) yang semasa revolusi di dengung-dengungkan untuk mengorbankan semangat perjuang rakyat berubah tanpa sedikitpun memberi dampak perubahan pada kondisi ekonomi rakyat. Manfaat *Liberte* (kebebasan) hanya menjadi milik mereka yang memiliki kapital untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Semangat *Egalite* dan *Fraternite* (persamaan dan persaudara) hanya menjadi milik lapisan masyarakat dengan strata sosial tinggi (pemilik modal kapitalis).

#### 1) Perkembangan Koperasi di Inggris.

Koperasi yang pertama didirikan adalah Inggris, sebagai akibat penderitaan yang dialami kaum buruh di Eropa akibat revolusi industri pada awal abad ke 19. Hal inilah yang mendorong pekerja pabrik tekstil sebanyak 28 orang untuk menyatukan kemampuan mereka yang terbatas dengan membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah toko. Maka pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris didirikan koperasi konsumsi yang dipelopori oleh Charles Howard.

Walaupun pada awalnya banyak mengalami hujatan, tetapi toko yang dikelola secara bersama-sama tersebut mampu berkembang secara bertahap. Rochdale Equitable Pioneer's Cooperative Society, dengan prinsip-prinsip:

- a) Keanggotaan yang bersifat terbuka.
- b) Pengawasan secara demokratis.
- c) Bunga yang terbatas atas modal anggota.
- d) Pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi.
- e) Barang-barang hanya dijual sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan harus secara tunai.
- f) Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku, bangsa, agama dan aliran politik.
- g) Barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang asli dan bukan yang rusak atau palsu.
- h) Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan.

Dari pedoman koperasi di Rochdale inilah prinsip-prinsip pergerakan koperasi dibentuk. Meskipun masih sangat sederhana tetapi apa yang dilakukan koperasi



Rochdale dengan prinsip-prinsipnya telah menjadi tonggak bagi gerakan koperasi di seluruh dunia. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale tersebut kemudian dibakukan oleh I.C.A dan disampaikan dalam kongres I.C.A di Paris tahun 1937.

Dalam rangka memperkuat gerakan koperasi, maka pada tahun 1862, koperasi-koperasi konsumsi di Inggris bergabung menjadi satu menjadi pusat koperasi pembelian {Cooperative Wholesale Society(CWS)}

## 2) Perkembangan Koperasi Di Perancis

Pelopop-pelopop koperasi di Perancis antara lain Charles Fourier, Louis Blance, serta Ferdinand Lasalle. Mereka menyadari bahwa setelah terjadinya revolusi di Perancis dan perkembangan industri yang menimbulkan kemiskinan, maka nasib rakyat perlu diperbaiki, dengan membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi bersama-sama dengan para pengusaha kecil.

Dewasa ini di Perancis terdapat Gabungan Koperasi Konsumsi Nasional Perancis (Federation Nationale Des Cooperative de Consummation), dengan jumlah koperasi yang bergabung sebanyak 467 buah, anggota 3.460.000 orang, toko 9.900 buah dan perputaran modal sebesar 3.600 miliar franc/tahun.

## 3) Perkembangan Koperasi di Jerman

Pada tahun 1848 di Inggris dan Perancis telah mencapai kemajuan industri, sedangkan di Jerman perekonomiannya masih bercorak agraris. Barang-barang impor dari Inggris dan Perancis memberikan tekanan berat perkembangan Industri di Jerman, demikian juga yang dialami oleh petani pedesaan.

Pada saat itu muncul pelopor koperasi di Jerman, yaitu F.W Raiffeisen, walikota Flammersfeld, Ia menganjurkan agar kamu petani menyatukan diri dalam kumpulan simpan pinjam. Koperasi Raiffeisen ini kemudian dikenal sebagai koperasi Kredit Peranian model Raiffeisen.

## 4) Perkembangan Koperasi di Denmark

Denmark adalah salah satu negara di Eropa yang dapat dijadikan contoh sebagai pengembangan koperasi pertanian. Kegiatan yang dilakukan para petani yang tergabung dalam koperasi pertanian perlu dipelajari sebagai pola yang cocok untuk membangun daerah agrarian.

Pada tahun 1952 anggota koperasi mencapai 1(satu) juta orang atau sekitar 30% dari jumlah penduduk Denmark. Dalam perkembangannya tidak hanya hasil-hasil peranian yang didistribusikan melalui koperasi, tetapi juga barang-barang

untuk kebutuhan sector pertanian. Selain koperasi pertanian, di Denmark juga berkembang koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini pada umumnya didirikan oleh serikat-serikat pekerja di daerah perkotaan.

#### 5) Perkembangan Koperasi di Swedia

Usaha koperasi di swedia umumnya ditunjukkan untuk menerangi kekuatan monopoli. Perhatian koperasi di Swedia lebih ditekankan pada penyediaan barang dengan harga murah dan mutu baik. Salah satu pelopor koperasi di Swedia ialah Albin Johansen. Mereka tidak hanya terlibat aktif dalam koperasi, tetapi dengan posisinya sebagai pejabat pemerintah mereka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi untuk tumbuh dan berkembang di Swedia. Berkat keinsyafan anggotanya.

Rahasia keberhasilan koperasi Swedia adalah berkat program pendidikan yang disusun secara teratur dan pendidikan orang dewasa di sekolah tinggi rakyat (Folk Higt School), serta lingkungan studi dalam pendidikan luar sekolah. Selain itu juga perhatian diberikan terhadap pendidikan bagi masyarakat di lingkungan daerah kerja koperasi.

#### 6) Perkembangan Koperasi di A.S

Koperasi yang tumbuh di Amerika Serikat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Rochdale, namun karena kurang berpengalaman maka banyak koperasi yang gulung tikar. Koperasi yang tumbuh antara tahun 1863 sampai dengan 1869, berjumlah 2.600 buah. Sekitar 57% koperasi Rochdale di kenal di Amerika Serikat tahun 1860, sehingga pertumbuhan koperasi secara pesat baru sekitar tahun 1880.

#### 7) Perkembangan Koperasi Di Jepang

Koperasi pertama kali berdiri di Jepang pada tahun 1900 (33 tahun setelah pembaharuan oleh kaisar Meiji), atau bersamaan dengan pelaksanaan undang-undang koperasi industry kerajinan. Walaupun di bawah nama koperasi industry kerajinan, namun pada hekekatnya koperasi ini juga bergerak dalam bidang pertanian.

Pada tahun 1920 ketika jepang sedang sedang membangun dan mengembangkan industrinya, koperasi yang ada benar-benar berfungsi sebagai tulang punggung bagi pembangunan pertanian yang menunjang industrialisasi.

Gerakan koperasi pertanian di Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia dalam periode 1933-1940.

Organisasi koperasi di Jepang yang ada sekarang berkembang berdasarkan undang-undang koperasi pertanian yang mulai berlaku tahun 1947. Hampir semua petani Jepang adalah anggota koperasi pertanian.

#### 8) Perkembangan Koperasi di Korea

Perkembangan koperasi di Korea khususnya koperasi pedesaan, di mulai pada awal abad ke 20. Koperasi kredit pedesaan misalnya sudah mulai dikenal pada tahun 1907. Koperasi didirikan oleh rakyat untuk kemakmuran pertanian membutuhkan uang untuk membiayai usaha pertaniannya.

Pada tahun 1959 koperasi kredit pedesaan di organisasi oleh pemerintah Korea menjadi Bank Pertanian Korea. Namun pada tahun 1957 koperasi pertanian melebarkan sayapnya dalam kegiatan simpan pinjam.

Pada tahun 1961 dalam rangka pelaksanaan undang-undang koperasi pertanian yang baru, BANK Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama gabungan koperasi pertanian nasional ( National Agreecultural Cooperative Federation) di singkat NACF.

### E. Koperasi Sebagai Suatu Sistem

Perlu kita ketahui bahwa persoalan yang dihadapi oleh manusia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, sedang sumber-sumber ekonomi sangat terbatas. Berbagai cara telah digunakan untuk memecahkan persoalan ekonomi yang mereka hadapi.

R.I. Heilbroner (Hendroyogi, 2003 : 3), ada tiga cara bagi masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, yaitu : dengan cara mengorganisir masyarakat menurut tradisi, menurut komando, dan menurut pasar. Ketiga cara tersebut disebut oleh Heilbroner sebagai *types of system*. Dalam system ekonomi yang pertama ini pada umumnya dalam system ini tiap keluarga menghasilkan sendiri barang-barang yang dibutuhkan. Produktivitas pada masyarakat ini masih sangat rendah. Cara penanganan masalah produksi dan distribusi adalah statis. Pemikiran secara rasional belum berkembang. Dalam ekonomi yang di kelola secara komando, Heilbroner mengatakan bahwa masyarakat dalam memecahkan masalah dan tantangan-tantangan ekonominya secara otoriter. Kehidupan masyarakat dan kegiatan-kegiatan pembangunan piramida-piramida di Mesir Kuno yang dalam

pelaksanaan pembangunannya menggunakan cambuk-cambuk otoriter adalah merupakan suatu contoh.

Cara yang ketiga yaitu pada system pasar, masyarakat menyerahkan pemecahan masalah dan tantangan-tantangan ekonominya kepada pasar. Dalam system ini, keuntungan-keuntungan yang menjadi daya tariknya dan bukan dorongan tradisi atau cambuk penguasa. Meskipun cara-cara yang digunakan oleh masyarakat dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan, permunculannya terjadi pada waktu yang berbeda-beda, seiring dengan perkembangan zaman, namun dalam kenyataannya ketiga system ekonomi tersebut masih bisa ditemukan secara bersamaan dalam masyarakat saat ini. Sistem pasar dengan 3 komponen penting, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal lahir dari penderitaan masyarakat khususnya para petani kecil dan buruh. Kekuatan-kekuatan besar yang membentuk pasar tersebut berjalan terus dan menghancurkan kakangan adat istiadat dan tradisi. Demikian pula kakangan otoriter secara bertahap telah pula disingkirkan. Dengan perkembangan zaman seperti tersebut diatas., kita melihat bahwa usaha manusia tidak dapat lagi terselesaikan dengan adat istiadat atau dengan perintah, akan tetapi dengan tindakan-tindakan bebas dari orang yang mengejar keuntungan yang satu sama lain saling terikat pada pasar tersebut. Sistem ini kemudian dinamakan kapitalisme. Dimana keuntungan menjadi ide dasarnya. Lahirnya kapitalisme ini tidak dapat dipisahkan dari Revolusi Industri yang terjadi di Inggris Pada abad XVIII yang banyak membawa penderitaan kehidupan kaum buruh di Inggris.

Pada era system kapitalisme inilah, inspirasi koperasi beserta gerakannya dilahirkan dan merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya kaum buruh, untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya dan yang dalam perkembangannya kemudian menjadi suatu system sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam system ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya, kegiatan-kegiatan masyarakat di atur oleh asas-asas yang telah mereka ciptakan, yang dikenal dengan asas-asas Rochdale, yang perkembangannya asas-asas tersebut telah mengalami perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan.

#### **F. Dampak Revolusi Industri Terhadap Pemikiran Koperasi**

Revolusi Industri yang terjadi di Inggris pada abad XVIII mempunyai sumbangan bagi lahirnya kapitalisme. Tetapi revolusi industri itu sendiri tidak akan

terjadi tanpa didahului oleh suatu rangkaian penemu di bidang Industry sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa pendapat yang diberikan oleh masyarakat terhadap akibat dari revolusi Industry. Ada yang memberikan tanggapan positif dan adapula tanggapan negatif, terutama yang menyangkut dampaknya terhadap kehidupan masyarakat golongan bawah.

*Pertama* : bagi kehidupan kaum buruh, Revolusi Industri ini memberikan akibat-akibat yang kurang menguntungkan, di antaranya :

1. Perbedaan lapisan antara pengusaha pabrik yang kaya dan buruh pabrik yang miskin, makin lama makin bertambah besar; Kebencian kelas seringkali menimbulkan kerusuhan-kerusuhan dan pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan pertumpahan darah.
2. Pekerjaan buruh pabrik menjadi berat dan menjemukan.
3. Pengangguran mesin-mesin berarti akan mengurangi kebutuhan akan tenaga buruh. Disamping itu pekerjaan dengan mesin-mesin mudah dikerjakan oleh wanita dan anak-anak sehingga akan menimbulkan banyak pengangguran yang disertai dengan turunnya upah.
4. Harga mesin yang sangat mahal bagi juru gilda, yang akan menyebabkan hanya kapitalis saja yang dapat membelinya, telah mendorong banyak pertumbuhan perusahaan-perusahaan besar.

*Kedua* : era Revolusi Industri tersebut memang merupakan waktu yang gelap bagi buruh, kondisi kerja sangat buruk dan penuh keonaran dan memberikan pemandangan yang suram dan mengerikan. Anak-anak di bawah 10 tahun banyak dipekerjakan di pabrik-pabrik. Penggunaan mesin-mesin itu berarti akan mendesak manusia

*Ketiga* : Dipandang dari ancaman gerakan koperasi di dunia, Revolusi Industri tersebut merupakan suatu hikmah, karena Revolusi Industri tersebut telah melahirkan inspirasi bagi lahirnya gerakan koperasi yang dicetuskan oleh Robert Owen (1830).

*Keempat* : Tidak kalah penting dari produk Revolusi Industri seperti tersebut di atas adalah bahwa Industry telah melahirkan 2 sistem pemikiran yaitu ilmu pengetahuan ekonomi atau *Economic Science* dan *Antithesis-nya sosialisme*.

Sosialisme sebagai antithesis dari *Economic Science* telah muncul sebagai suatu gerakan politik yang teratur dan efektif. Robert Owen (1717-1858) dianggap sebagai pendiri sosialisme di Inggris, dan adalah orang yang pertama

menggunakan istilah sosialisme pemikiran-pemikiran dan usaha-usaha untuk menolong penderitaan kaum buruh nampaknya tidak terhenti sampai disini saja. Munculnya berbagai ide/gagasan pembaharuan social itu akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan tekanan pemikiran dalam lingkungan koperasi sendiri.

## **BAB II**

### **GERAKAN KOPERASI DI INDONESIA**

#### **A. Gerakan Koperasi di Indonesia**

Walaupun koperasi telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1895, namun lembaga gerakan koperasi baru muncul sekitar 50 tahun kemudian. Lembaga gerakan koperasi yang pertama, yang bernama Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI) itu. Lahir melalui kongres koperasi 1 yang berlangsung di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tahun 1947. Namun SOKRI tidak sempat berkiprah sebagaimana diharapkan.

Lembaga gerakan koperasi Indonesia baru dapat bergerak secara lebih baik setelah dibentuknya Dewan Koperasi Indonesia (DKI) pada tahun 1953. Namun demikian, organisasi gerakan koperasi Indonesia meliputi struktur organisasinya, telah berulang kali mengalami perubahan. Sampai akhirnya menjadi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), sebagaimana dikenal saat ini.

##### **1) Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI)**

Keinginan untuk menyelenggarakan kongres koperasi nasional itu terlaksana pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, atas prakarsa pusat koperasi perikanan. Berdasarkan kesempatan yang tercapai dalam kongres tersebut, maka disepakatilah untuk meresmikan berdirinya organisasi koperasi tingkat nasional pertama dengan nama Sentral Organisasi Koperasi Indonesia. Selain itu juga dipakai untuk menetapkan tanggal 12 Juli setiap tahunnya sebagai hari koperasi.

Organisasi gerakan koperasi yang pertama ini tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana diharapkan, hal ini dikarenakan kondisi Negara kita masih diwarnai pergolakan fisik antara Indonesia dan Belanda dalam rangka memperthankan kemerdekaan (dikenal sebagai agresi Belanda).

##### **2) Dewan Koperasi Indonesia (DKI)**

Sebagai tindak lanjut dari kegagalan SOKRI dalam upaya mempersatukan gerakan koperasi Indonesia, maka diupayakan untuk menyelenggarakan Kongres Koperasi yang kedua. Kongres Koperasi kedua berlangsung pada tanggal 15-17 Juli 1953 di Bandung.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kongres, maka dibentuklah organisasi gerakan koperasi yang baru dengan nama Gerakan Koperasi Indonesia (GKI). Pada kongres itu juga disepakati untuk mengangkat Bung Hatta sebagai

Bapak Koperasi Indonesia. Sesuai dengan anggaran dasar GKI. Maksud dan tujuan GKI adalah ingin melaksanakan cita- cita nasional yaitu untuk menyusun perekonomian bangsa atas dasar asas kekeluargaan sebagai mana dinyatakan dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Adapun cara yang ditempuh GKI dalam mencapai usaha cita cita tersebut adalah:

1. Menyebarkan, memelihara dan mempertahankan cita- cita koperasi.
2. Memperhatikan dan membantu pelaksanaan kepentingan perkumpulan koperasi dan
3. Membela hak hidup dan berkembang secara bebas bagi perkumpulan koperasi terhadap usaha- usaha yang merintanginya. Bila perlu bekerjasama dengan seluruh gerakan koperasi, serta memandangnya dari sudut perkembangan nasional.

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut DKI melakukan upaya- upaya sebagai berikut:

- 1) Meminta penjelasan atau pendapat, pertimbangan atau nasihat kepada pemerintah serta badan- badan yang diakuinya mengenai masalah yang berkaitan dengan koperasi.
  - 2) Membiarkan penyuluhan kepada masyarakat dan pers tentang segala persoalan yang berkaitan dengan gerakan koperasi.
  - 3) Menyelenggarakan penerangan- penerangan serta pendidikan khusus mengenai koperasi.
  - 4) Menerbitkan majalah tentang koperasi.
  - 5) Mengadakan rapat- rapat dan perundingan dengan intensi terkait.
  - 6) Mempelajari dan mengusahakan pemecahan masalah- masalah sosial, ekonomi, dan politick yang berkaitan secara langsung dengan koperasi.
  - 7) Mencari dan memelihara hubungan baik dengan gerakan- gerakan koperasi internasional.
  - 8) Membantu setiap perjuangan, khusus yang dihadapi oleh suatu koperasi yang tergabung dan terutama yang bersifat mempertaruhkan dasar paham koperasi.
- 3) Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (SOKSI).**

Sebagai akibat pelaksanaan demokrasi terpimpin, maka kehidupan ekonomi nasional bergeser pula pada ekonomi terpimpin, sehingga unsur demokrasidan ekonomi terpimpin terlihat jelas dalam penyelenggaraan usaha koperasi pada



masa itu. Pengawasan terhadap usaha koperasi cenderung sangat besar, karena koperasi yang ada dijadikan sebagai alat untuk mendukung kebijakan ekonomi terpimpin.

Upaya pemerintah untuk menjamin bahwa koperasi yang ada dapat dijadikan sebagai alat kebijakan pemerintah, maka pada tanggal 03 Juni 1961 dibentuk Kesatuan Organisasi Seluruh Indonesia (KOKSI) sebagai pengganti DKI. Dengan keputusan Presiden Nomor 226/1961, susunan organisasinya disesuaikan dengan susunan ketatanegaraan Indonesia waktu itu. Keorganisasian KOKSI bersifat tunggal dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Dewan Nasional, berkedudukan di Ibu kota Negara;
- b. Dewan Daerah Tingkat I berkedudukan di ibu kota provinsi;
- c. Dewan Daerah Tingkat II berkedudukan di kabupaten/ kota;

Dibidang manajemen terlihat jelas kepentingan politik pemerintah didalam usaha koperasi. Hal itu bisa dilihat dari pengawasan koperasi. Pemimpin organisasi adalah Dewan pemimpin yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno. Anggota Dewan terdiri dari unsur pemerintahan gerakan koperasi, dan para ahli serta wakil- wakil daerah yang diangkat oleh pemerintah. Ketua Dewan KOKSI dipegang oleh Menteri yang bertanggung jawab urusan koperasi.

Puncak campur tangan pemerintah pada masa itu adalah dengan mencabut UU Nomor 79/1958, dan menggantinya dengan UU Nomor 14/1965. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa kepengurusan (koperasi) harus mencerminkan kekuatan progresif revolusioner yang berporoskan Nasakom dan harus berjiwa Manipol Dengan Kebijakan politik dan ekonomi tersebut, maka organisasi koperasi pada masa itu sangat sulit untuk berkembang secara wajar.

#### **4) Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin)**

Sejak tahun 1966, Pemerintah Orde Baru bertekad membangun kembali gerakan koperasi di Indonesia. Dari hasil musyawarah nasional gerakan koperasi yang berlangsung tanggal 13- 17 Juli 1966, mendesak pemerintah untuk membubarkan Koksi. Dan sebagai gantinya pada bulan Juli 1967. Menteri perdagangan dan koperasi menyetujui pembentukan wadah gerakan koperasi yang baru, yang disebut Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin).

Pada musyawarah nasional gerakan – gerakan koperasi pada bulan Juli 1966, dinyatakan sebagai Munas yang pertama Gerkopin. Pada Munas ini Gerkopin juga

menyarankan agar pemerintah mencabut UU Nomor 14/1965, karena dipandang telah menempatkan koperasi sebagai kendaraan politik semata. Kemudian pemerintah membentuk Panitia Peninjauan UU No 14/1965 (yang diketuai oleh Ir. Ibnoe Sudjono. Asisten Menteri Urusan Koperasi). Dari panitia tersebut berhasil disusun RUU perkoperasian, yang kemudian disahkan menjadi UU No 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, pada tanggal 18 Desember 1967.

##### **5) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)**

Dengan diperlakukannya UU No 12/1967, maka pada tahun 1968 berdirilah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Sesuai dengan kesepakatan Gerakan Koperasi Indonesia. Dekopin dinyatakan sebagai satu satunya wadah tunggal gerakan koperasi di indonesia. Dekopin didaftarkan sebagai badan hukum secara syah pada tahun 1970.

Anggaran Dasar Dekopin telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah pada Musyawarah Nasional Koperasi XI di Jakarta pada tahun 1983. Dekopin mempunyai kedudukan sebagai gerkakan koperasi yang melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- a. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
- b. Meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat.
- c. Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat.
- d. Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antar koperasi dengan badan usaha lain. Baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Sesuai dengan anggaran dasarnya, dekopin dinyatakan sebagai organisasi yang bersifat tunggal. Dengan kata lain meskipun Dekopin mempunyai susunan organisasi dipusat manapun didaerahnya, ia tidak mengenal adanya otonomi didalam struktur organisasinya. Organisasi dekopin secara nasional adalah sebagai berikut:

1. Di Tingkat Pusat Dekopin, berkedudukan di ibu kota Negara, yaitu Jakarta;
2. Di Tempat Provinsi disebut Dekopin Wilayah yang berkedudukan diibukota Provinsi.
3. Di Tingkat Kabupaten/ Kota disebut Dekopin Daerah yang berkedudukan ibukota Kabupaten /Kota.

## **B. Hubungan Dekopin Dengan Koperasi di Luar Negeri**

Sebagai salah satu anggota ICA, hubungan Dekopin dengan koperasi – koperasi diluar negeri berjalan dengan baik. Hal ini terutama dalam meningkatkan kemampuan koperasi di indonesia untuk mencapai tujuan. Dalam hubungan dengan koperasi diluar negeri memberi kesempatan luas untuk memperoleh bantuan Negara ahli dan kesempatan untuk memperoleh dengan bantuan ahli dan kesempatan untuk mengikuti latihan di bidang perkoperasian. Koperasi- koperasi luar negeri yang pernah menawarkan bantuannya melalui Dekopin adalah:

1. Dewan koperasi India (National Cooperative Union OF India), menawarkan kesempatan menawarkan latihan perkoperasian.
2. Dewan koperasi Amerika Serikat (Cooperative League of USA), menawarkan tenaga ahli, bantuan penyusunan Project Design; bantuan pengembangan beberapa jenis koperasi. Untuk maksud ini dibuka Kantor Cabang Dewan Koperasi AS di Jakarta pada tahun 1977.
3. Pusat Koperasi Swedia (Swedish Cooperative Center) yang bersedia mendidik tenaga- tenaga indonesia terutama di bidang Koperasi Konsumsi.
4. Koperasi Asuransi Malaysia, telah menyanggupi bantuan latihan di bidang Koperasi perasuransian di Kuala Lumpur.
5. Koperasi Asuransi Jepang, telah bersedia membantu tenaga indonesia dalam mendidik perasuransian.

## **C. Sikap Pemerintah Terhadap Gerakan Koperasi**

Koperasi pada umumnya diberikan status badan hukum dengan undang- undang yang ada atau sesuai dengan system yang sudah ada dan sudah antap digunakan di Negara yang bersangkutan sebelum adanya perkumpulan koperasi. Tetapi sebelum adanya koperasi dan perkembangan yang cepat, serta memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh usaha lain, maka dalam perkembangannya dikeluarkanlah peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang perkoperasian oleh pemerintah. Perundang- undangan ini ada yang berdiri sendiri dan langsung mengatur koperasi di Negara yang bersangkutan, tetapi ada yang hanya dititipkan permasalahan koperasi kedalam perundan- undangan yang lain.

Dalam perkembangannya meskipun pemerintah dimasing – masing Negara telah membuat undang- undang tentang perkoperasian, dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam sikap pemerintah terhadap gerakan koperasi di masing- masing

Negara. Sikap pemerintah dalam gerakan koperasi menurut Hendrojogi (2000:289) dapat dikelompokkan dalam 4 macam antara lain:

1. Sikap pemerintah yang netral.
2. Sikap yang menghambat dan menghalang-halangi.
3. Sikap pemerintah yang membantu dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi.
4. Sikap pemerintah yang ingin menjadikan koperasi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan nasionalnya.

### **1. Sikap Pemerintah yang Netral**

Dengan sikap ini artinya pemerintah tidak memberikan perhatian dan pengakuan yang khusus kepada koperasi dan umumnya mereka juga tidak mengeluarkan perundang-undangan khusus tentang perkoperasian di Negaranya. Disini koperasi diperlukan sama dengan usaha-usaha yang lain yang mencari keuntungan atau bisa sebagai zedilijik lichaam, tergantung pada system yang diikuti oleh Negara yang bersangkutan.

Pemerintah di Negara- Negara Eropa bagian utara umumnya mempunyai sikap yang netral terhadap gerakan koperasi. Mereka melihat perkumpulan-perkumpulan koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi yang sudah mantap di Negara tersebut dan hidup matinya koperasi tersebut ditentukan oleh usaha-usaha mereka sendiri. Sebagai contoh yang ekstrim misalnya, Denmark, Denmark memiliki undang-undang khusus tentang perkoperasian dan hanya bantuan yang sangat marginal dari pemerintah. Namun demikian koperai pengcer (*retailcooperatives*) dan koperasi pemasaran tradisional berkembang sangat cepat tanpa dukungan undang-undang dan bantuan pemerintah. Namun, secara khusus, sesungguhnya di Denmark ada undang-undang lain, seperti undang-undang tentang perdagangan, undang-undang tentang perseroan, undang-undang perpajakan dan sebagainya.

Dengan tidak adanya perundang-undangan yang mengatur khusus tentang koperasi, bukan berarti koperasi-koperasi di Denmark itu seakan-akan menghindari adanya interaksi dengan pemerintah. Namun justru sejak lama antara koperasi dan pemerintah Denmark terjalin interaksi yang tradisional. Sebagai contoh koperasi pertanian sejak tahun 1930-an terjadi interaksi dengan pemerintah. Namun demikian walaupun terjadi interaksi yang baik antara koperasi pertanian dengan pemerintah, tetapi koperasi pertanian di Denmark tetap bisa mempertahankan pendiriannya yaitu menolong diri sendiri.

## **2. Sikap Pemerintah yang Menghambat atau Melarang Pertumbuhan dan Perkembangan Gerakan Koperasi**

Sikap pemerintah yang menghambat dan melarang pertumbuhan dan perkembangan koperasi, umumnya diwujudkan dalam dua bentuk yaitu:

- a. Sikap pemerintah yang menghambat yaitu, dengan tidak memberikan kemudahan—kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi, seperti yang dialami oleh gerakan koperasi di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda.
- b. Sikap pemerintah yang melarang yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemerintah yang menyatakan jelas-jelas melarang adanya perkumpulan koperasi, seperti yang dialami Indonesia pada waktu penjajahan Jepang.

Sikap-sikap pemerintah yang demikian umumnya mempunyai latar belakang politik, dalam arti adanya kekhawatiran dari penguasa bahwa gerakan koperasi akan digunakan oleh lawan politiknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## **3. Sikap Pemerintah yang Membantu Gerakan Koperasi**

Pada umumnya Negara-negara maju mempunyai sikap yang positif terhadap gerakan koperasi, dalam arti pemerintah mendukung pertumbuhan dan perkembangan koperasi, disertai dengan pemberian bantuan. Pada umumnya bantuan-bantuan diberikan kepada koperasi baik di Negara-negara maju maupun di Negara-negara sedang berkembang diwujudkan dalam bentuk, sekedar memberikan landasan bagi kedudukan hukum kepada koperasi, memberikan petunjuk-petunjuk operasional, memberikan fasilitas-fasilitas, sampai dengan memajukan koperasi. Sebagai suatu organisasi ekonomi, koperasi tentunya memerlukan adanya suatu, pegangan atau dasar hukum dengan nama koperasi bisa beroperasi.

Seperti halnya di Negara-negara lain, di Amerika Serikat koperasi-koperasi yang pertama umumnya didirikan sebelum adanya undang-undang perkoperasian yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Amerika Serikat ternyata undang-undang perkoperasian diundangkan lebih dulu oleh Negara-negara bagian daripada oleh pemerintah Federal.

Meskipun perundang-undangan tentang perkoperasian di Negara-negara tersebut perbedaan, namun umumnya undang-undang di Negara-negara tersebut mempunyai persamaan dalam hal penanganan *non stock cooperatives* yang diorganisir berdasarkan saling memberikan keuntungan kepada anggota dan bersifat *non-profit*.

Sikap pemerintah yang membantu gerakan koperasi, juga dialami oleh gerakan koperasi di Indonesia, terutama setelah kemerdekaan. Walaupun sebenarnya sejak zaman penjajahan Belanda sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi antara lain Verordening tentang Perkumpulan Koperasi, Staatsblad Nomor 431 Tahun 1915, namun peraturan ini justru dianggap sebagai penghambat perkembangan koperasi maka pada tahun 1920 dibentuklah *cooperative commissie* pada tanggal 10 Juni 1920 yang diketuai oleh Dr.J.H. Boeke dengan 10 orang anggota, 7 orang Eropa dan 3 orang anggota Bumiputera. Tugas komisi tersebut adalah menyelidiki kemungkinan-kemungkinan di kemudian hari bagi koperasi di Hindia dan dengan jalan bagaimana koperasi boleh diperluas.

Enam tahun setelah laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah, maka dikeluarkan suatu peraturan yang disebut “Regeling Inlandsche Cooperative Verenigingen” yang dicatat dalam staatsblad Nomor 91 Tahun 1927. Dibanding dengan Verordening tentang perkumpulan Koperasi staatsblad Tahun 1915 Nomor 4331, RIC tabl Nomor 91 Tahun 1927 selain memberikan dasar-dasar hukum, juga mendidik anak agar negeri kearah koperasi. Kemudahan-kemudahan yang diberikan RIC adalah:

- a. Cara meminta hak rechtspersoon dibuat sesederhana mungkin
- b. Anggaran dasar dibuat 2 lembar di atas segel masing-masing.

Sikap pemerintah yang positif atau aktif membantu pertumbuhan dan pergerakan koperasi serta memberikan perlindungan kepada koperasi secara nyata, baru dialami oleh gerakan koperasi di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945, yang dengan jelas dapat dibaca dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan :

*“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”*

Dimana dalam penjelasannya dikatakan bahwa :

*“Perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi”*

Ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dasar inilah yang merupakan dasar atau landasan yang kuat bagi pemerintah untuk membantu, mendorong, dan melindungi pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi di Indonesia, selanjutnya sikap pemerintah yang ingin membantu pertumbuhan dan

perkembangan gerakan koperasi dapat dilihat pada pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

#### **4. Sikap Pemerintah yang Ingin Menjadikan Koperasi Sebagai Alat Untuk Melaksanakan Kebijakan Nasionalnya**

Pada umumnya di Negara-negara yang sedang berkembang, seperti di Negara-negara Amerika Latin, negara-negara di Afrika dan negara-negara di Asia, undang-undang atau peraturan tentang perkoperasian yang diciptakan oleh pemerintah bersifat sangat mendetail. Sikap yang demikian ini mungkin bisa diberikan jika di dalam Negara yang bersangkutan, jumlah warga yang terdidik atau tenaga pemimpin adalah langkah dan sebagian besar rakyatnya masih buta huruf. Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi di Negara-negara umumnya sangat formal. Selanjutnya, dalam perkembangan pejabat-pejabat pemerintah mulai mengawasi kegiatan koperasi terutama di dalamnya penempatan pegawai dalam koperasi atau setidaknya memberikan persetujuan dalam pengangkatan pegawai dalam organisasi koperasi. Undang-undang atau peraturan yang dibuat terlalu mendetail, menjadikan campur tangan pemerintah dalam kehidupan koperasi dijadikan alat dari pemerintah untuk mencapai tujuan dari kebijakannya.

Bagi gerakan koperasi kondisi yang demikian ini akan menciptakan dualism dalam usaha pembangunan atau pengembangan koperasi. Kondisi yang demikian ini banyak dialami oleh koperasi-koperasi di Negara-negara Afrika. Koperasi pertanian di Negara-negara tersebut sedikit merupakan sebyek dari program *comprehensive* pemerintah yang dikaitkan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosialnya.

Dalam keadaan demikian masyarakat koperasi disatu oihak dihadapkan pada otoritas atau di lain pihak pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Masing-masing pihak mempunyai harapan dan keinginan sendiri-sendiri yang ingin dicapainya. Koperasi yang berasakan sukarela ingin mengembangkan dan membangun organisasi dan usahanya seperti yang diamanatkan oleh Rapat Anggota, di samping ada tujuan lain yang ingin dicapainya, di mana pengurus akan menentukan merumuskan kebijakannya, dengan berlandaskan pada asas-asas koperasi dan merujuk pada anggaran dasar organisasi. Kebijakan tersebut disebut sebagai kebijakan mikro dari rencana pembangunan koperasi (*micropolic of cooperative development*). Di lain pihak pemerintah dalam rangka pembangunan ekonominya, yang umumnya menyangkut pembangunan sector

pertanian (*agricultural development*), juga menggariskan kebijakan untuk mengembangkan koperasi-koperasi pertanian, kebijakan ini disebut sebagai *macropolicy of cooperative development*.

Permasalahan yang timbul adalah dapatkan kebijakan mikro dari rencana pengembangan koperasi tersebut dipertemukan dengan kebijakan makro dari rencana pengembangan koperasi. Atau bisa kebijakan mikro dari rencana pengembangan koperasi tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kedua-duanya baik pemerintah maupun gerakan koperasi mempunyai tujuan yang baik. Hanya sasarannya yang mungkin berbeda. Dalam hal keduanya mempunyai sasaran yang sama, maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menggunakan koperasi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan nasionalnya.

Keadaan demikian pernah dialami oleh gerakan koperasi Indonesia, khususnya dengan Koperasi Unit Desa (KUD) meskipun penggunaan koperasi sebagai alat dari pemerintah untuk mencapai tujuan hanya bersifat parsial, yaitu ketika pemerintah menggunakan KUD sebagai alat untuk mendistribusikan pupuk kepada petani dengan harga bersaing. Bahkan untuk melaksanakan KUD pada lini ke-4 (ditingkat desa) diderikan kedudukan monopoli untuk menyalurkan pupuk kepada para petani. Dalam hal campur tangan pemerintah telah memberikan hasil positif, kedua belah pihak tidak dirugikan, bahkan mereka mendapat keuntungan dan hikmahnya. Tetapi tidak jarang bahwa sasaran kebijakan mikro dari rencana pengembangan koperasi tersebut tidak sejalan dengan kebijakan makro dari rencana pengembangan sektor pertanian dari pemerintah. Misalnya kebijakan makro rencana sektor kebijakan pertanian, pemerintah menjadikan perbaikan dari struktur produksi sebagai sasaran, sedangkan sasaran kebijakan mikro dari koperasi-koperasi pertanian adalah perbaikan pemasarannya.



### **BAB III**

#### **TUJUAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI**

Di Indonesia, koperasi biasa ditemui di sekolah, kantor, dan desa. Keberadaan koperasi penting dalam menopang perekonomian rakyat Indonesia.

Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong “seorang untuk semua dan semua untuk seorang.”

Sementara menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomu rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

#### **A. Tujuan**

Tujuan utama koperasi di Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita lagi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun maksud dan tujuan koperasi adalah :

1. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat
2. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Tujuan koperasi Indonesia adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1) berbunyi : “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa :

“koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembuka yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodic, adanya cadangan dan sebagainya.

Tujuan utama koperasi di Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba buka merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan dari pada laba.

Tujuan adanya koperasi lebih menekankan untuk para anggota yang tergabung didalamnya yaitu memberikan jasa para anggotanya agar lebih bersemangat dalam bekerja untuk tercapainya peningkatan pendapatan bagi para anggota. Mengembangkan daya kreasi dan daya usaha rakyat, meningkatkan pendapatan serta menimbulkan pembagian yang adil dan merata, mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa, melainkan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Selain tujuan koperasi diatas, koperasi memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Peranan koperasi adalah :

- a. Sebagai sokoguru/uratnadi perekonomian Indonesia;
- b. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota dan masyarakat;
- c. Mempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat;

- d. Mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata;
- e. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat; dan
- f. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Maka ada aturan yang mengatur tujuan koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota di Indonesia yang dapat kita lihat pada pasal 3 Undang-Undang No.25/1992 tentang perkoperasian, dikatakan bahwa :

“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia, dasar hukum dari pengertian koperasi terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992 dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kopeasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan mekandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan bertumpu pada pendapat-pendapat para ahli dan ketentuan UU Perekonomian tahun 1992 dapat dipetik makna bahwa koperasi adalah badan usaha bersama dimana usaha bersama tersebut menunjukkan semangat bekerja sama dalam kegotongroyongan dengan mengutamakan perserikatan (tidak sendiri-sendiri). Tujuan koperasi secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan.

Dalam membentuk sebuah koperasi diharapkan mampu mencapai tujuannya yaitu sebagai berikut (dalam pasal 4 UU N.25 tahun 1992)

- a. Untuk membangun dan mengembangkan suatu potensi atau kemampuan ekonomi anggota yang khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan sebuah kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan dan aktif dalam upaya mempertinggi sebuah kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Untuk memperkokoh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
- d. Berusaha dalam mewujudkan dan mengembangkan suatu perekonomian nasional yang merupakan suatu usaha bersama yang berdasarkan asas keluarga

dan demokrasi ekonomi.

## **B. Asas**

Dalam koperasi Indonesia kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi keadaan dan lingkungan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan bersemboyan Bhineka Tunggal Ika. Bagi koperasi asas kekeluargaan terdapat keinsyafan, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap kerja tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri tetapi untuk kesejahteraan bersama.

Asas koperasi atau dalam bahasa inggrisnya disebut cooperative principles ini berasal dari bahasa latin yaitu Principum yang berarti basis atau landasan dan ini bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi.

Dalam suatu koperasi memiliki 2 asas, yaitu : Asas kekeluargaan dan Asas Gotong Royong

### **1. Asas kekeluargaan.**

Asas kekeluargaan ialah setiap anggota koperasi mempunyai sebuah kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap suatu kegiatan koperasi, dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Disamping koperasi yang mendasari pengelolaan organisasi dan administrasi usahanya, gerakan koperasi juga harus mencerminkan asas kekeluargaan

2. Asas gotong royong.

Asas gotong royong ialah setiap anggota koperasi harus mempunyai sebuah toleransi, dan tidak egois atau individualis, dan mau dalam bekerja sama dengan anggota lainnya.

3. Asas gotong-royong dan kekeluargaan.

Asas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi hendaknya merupakan pikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerjasama dalam pelaksanaan kewajiban dan hak yang bersifat bantu-membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih

Koperasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang dalam ketentuan, bagian pertama, Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan, “koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia

Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan hidup, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, gotong royong seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong-royong, yang mencerminkan semangat bersama.

Dengan perkataan lain, koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong-royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul berat sama dijinjing semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi. Tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama.

Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Dalam suatu keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama di tujuikan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut gotong royong. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian yang luas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Royong dalam lingkup organisasi
- 2) Bersifat terus menerus dan dinamis
- 3) Dalam bidang atau hubungan ekonomi
- 4) Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan

Asas adalah prinsip atau dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir. Asas-asas koperasi adalah suatu sistem ide yang menjadi dasar atau prinsip atau petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Pada dasarnya asas koperasi adalah asas kekeluargaan dan gotong royong.

Asas koperasi adalah kekeluargaan dan Asas Gotong Royong. Asas kekeluargaan artinya setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kebersamaan dan toleransi yang tinggi kepada semua anggota seperti halnya sebuah keluarga, siap berkorban demi kepentingan keluarga besar “koperas” dan hal lain yang diperlukan untuk kemaslahatan seluruh anggota koperasi. Asas gotong royong artinya, setiap anggota koperasi tidak boleh memiliki sifat egois atau individualis, serta mau dan mampu bekerja sama dengan anggota lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Pasal 3 menyatakan bahwa koperasi di Indonesia berdasarkan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat berakar dalam jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat tinggal, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotongroyongan dalam arti bekerja sama, saling bantu-membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan menganut asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari bud hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersanma.

Asas kekeluargaan tersebut memiliki suatu karakteristik khas bangsa Indonesia, yaitu kerjasama atau kegotongroyongan. Di dalam kerjasama atau kegotongroyongan tersebut tercermin bahwa di dalam koperasi telah terdapat kesadaran dan keinsyafan semangat kerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul.

Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan semakin kuat dan pelaksanaan kerjanya akan semakin lancar karena para anggotanya dukung-mendukung dan dengan penuh kegirahan kerja serta tanggung jawab berjuang mencapai tujuan koperasi,

Asas kekeluargaan ini merupakan faham yang dinamis, artinya timbul dari semangat yang tinggi untuk secara bekerjasama dan tanggung jawab bersama berjuang mensukseskan tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama dan berjuang secara menunggal untuk mengatasi risiko yang diderita koperasinya sebagai akibat usahanya untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong-royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Pasal 2 Undang-undang Perkoperasian menyebut “Koperasi Berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan.”

Koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Ini sesuai dengan kepribadian bangsa.

Bagi koperasi, asas gotong royong berarti dalam koperasi terdapat kesadaran bekerja sama dan tanggung jawab bersama dengan tidak memikirkan diri sendiri.

Asas kekeluargaan berarto mencerminkan kesadaran dari hari untuk berpartisipasi. Seperti kata Bapak Moh Hatta, “satu untuk semua, semua untuk satu.”

Usaha yang dijalankan koperasi menjadi tanggung jawab bersama. Keuntungan maupun kerugiannya ditanggung bersama.

Semangat kebersamaan itu tidak hanya dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi, tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama.

### **C. Prinsip**

Prinsip sering diartikan sebagai suatu aturan yang berlaku untuk mengarahkan, yang pada umumnya merupakan aturan fundamental. Prinsip digunakan sebagai pedoman bagi pengurus dan manajer koperasi dalam menjalankan aktivitasnya.

Prinsip koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah koperasi. Selain mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pola pengelolaan organisasi koperasi, prinsip-prinsip ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi. Peranan tersebut dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya.

Tujuan koperasi dalam menjalankan usahanya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada umumnya. Orientasi usaha yang memihak pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat ini harus dipegang teguh oleh koperasi. Ia tidak hanya sekedar pembeda antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, tetapi merupakan hakikat dari koperasi itu sendiri.

2. Sebagai ciri khas yang membedakan koperasi dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya

Prinsip-prinsip atau sendi-sendi dasar koperasi tidak hanya mengatur masalah-masalah intern koperasi, yakni mekanisme kerja dalam organisasi koperasi dan hubungan antara koperasi dengan anggota-anggota yang terlibat dalam pengurusan koperasi. Tetapi juga mengatur hubungan antara koperasi dengan anggota-anggota lainnya serta hubungan antara koperasi



dengan perusahaan-perusahaan di luar koperasi. Prinsip-prinsip merupakan jantung dari koperasi adalah tidak independent yang satu dari yang lain. Mereka saling terkait secara halus, bilamana yang satu diabaikan, keseluruhan menjadi berkurang. Koperasi seharusnya tidak dapat dinilai secara eksklusif berdasarkan salah satu prinsip, akan tetapi harus dinilai beberapa jauh koperasi secara benar mentaati prinsip-prinsip tersebut sebagai satu keseluruhan.

Prinsip koperasi merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Koperasi memiliki prinsip yang menunjukkan jati diri atau ciri khas yang membedakannya dengan badan usaha lain. Prinsip koperasi merupakan aturan-aturan dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi:

- 1) Prinsip Rochdale :
  - a. Pengawasan secara demokratis
  - b. Keanggotaan yang terbuka
  - c. Bunga atas modal dibatasi
  - d. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
  - e. Penjualan sepenuhnya dengan tunai
  - f. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dapat dipalsukan
  - g. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota
  - h. Netral terhadap politik dan agama
- 2) Prinsip Raiffien :
  - a. Swadaya
  - b. Daerah kerja terbatas
  - c. SHU untuk cadangan
  - d. Tanggungjawab anggota tidak terbatas
  - e. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
  - f. Usaha hanya kepada anggota
  - g. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

### 3) Prinsip Koperasi Indonesia

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal
- e. Kemandirian

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya juga memiliki prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, sebagai berikut:

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.
- h. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai seko gurunya;
- i. Kemandirian;
- j. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Menurut Hendrojogi (2012:46) prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik, prinsip-prinsip koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka,  
Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), latar belakang sosial, ras politik atau agama.
2. Pengawasan demokratis oleh anggota  
Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.
3. Otonomi dan kemandirian (independence).  
Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonomi mereka.
4. Pendidikan, pelatihan dan penerangan.  
Koperasi pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para menejer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini dimasyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.
5. Kerjasama antar koperasi.  
Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi, nasional, regional dan internasional.
6. Kepedulian terhadap masyarakat,

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

7. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi.

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut).Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi.Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang diisyaratkan untuk menjadi anggota. Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini:

- a. Mengembangkan koperasi mereka, dengan cara membentuk dana cadangan sebagian dari padanya tidak dapat dibagikan.
- b. Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi.
- c. Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

## **BAB IV**

### **FUNGSI DAN PENGGOLONGAN KOPERASI**

#### **A. Fungsi dan Peran Koperasi**

Pendirian koperasi pada mulanya dimaksudkan untuk menolong para petani dari pertanian harga yang dilakukan oleh Tengkulak. Hal ini terjadi pada awal Revolusi Industri di Eropa, dimana harga barang-barang hasil pertanian dipermainkan oleh para tengkulak, disamping itu juga kaum buruh yang diabaikan oleh kaum kapitalis.

Ketergantungan ini terutama disebabkan oleh keadaan ekonomi petani dan kaum buruh yang masih bersifat subsistem. Untuk mengatasi keadaan ini petani meminjam pada tengkulak dengan menjamin hasil pertaniannya, sedangkan kaum buruh mendapat tekanan kuat dari kaum kapitalis, dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mendalami fungsi dan hak koperasi. Pada kegiatan ini akan membahas secara rinci, yang meliputi tiga bagian. Bagian pertama membahas pandangan beberapa aliran pemikiran koperasi dalam masyarakat. Kedua membahas fungsi dan peranan koperasi dalam bidang ekonomi dan sosial. Dan ketiga membahas fungsi dan peran koperasi di Indonesia.

##### **1) Beberapa Pandangan Mengenai Fungsi Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi dalam masyarakat setidaknya-tidaknya dapat dikelompokkan kedalam 3 aliran. Sebagaimana dikemukakan oleh Casselman (1989), ketiga aliran tersebut adalah:

###### **a) Aliran Yurdistick**

Menurut pandangan, aliran ini fungsi dan peranan koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetralisirkeburukanyang timbul oleh system perekonomian kapitalis. Sasaran gerakan koperasi hanya terbatas pada segi menghilangkan praktek-praktek persaingan yang tidak sehat pada system perekonomian kapitalis.

###### **b) Aliran Sosialis**

Menurut pandangan, aliran ini fungsi dan peranan koperasi berbeda dengan pandangan aliran Yurdistick. Aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Maka kehadiran

koperasi banyak didalam masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti system perekonomian kapitalis tersebut.

c) Aliran Persemakmuran

Aliran ini dapat dikategorikan aliran tengah. Di satu pihak sebagaimana aliran yurdstick, aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai suatu sistem perekonomian yang harus dihancurkan, tetapi sebagaimana aliran sosialis, sepakat harus system perekonomian kapitalis pernah dikoreksi, namun tidak diseredikal aliran sosial.

Menurut aliran ini fungsi dan peranan koperasi didalam masyarakat kapitalis tidak sekedar sebagai tolak ukur alat penawar, tetapi sebagai alternatif sebagai bentuk kerusakan kapitalis. Sebagai bnetuk perusahaan alternatif, maka peranan koperasi harus terus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi.

## **B. Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial**

Pada dasarnya usaha koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungsi bidang sosial.

### **1. Fungsi dalam Bidang Ekonomi**

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.
- b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
- c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk kosentrasi permodalan lainnya.
- d. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
- e. Meningkatkan penghasilan anggota.
- f. Menyederhanakan dan mengefesiensikan tata niaga.
- g. Menumbuhkan sikap jujur dan keretbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
- h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
- i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif.

## 2. Fungsi Dalam Bidang Sosial

- a. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan mereka, mampu dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.
- b. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab.
- c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
- d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

## C. Penggolongan Koperasi

Secara umum penggolongan koperasi di Indonesia diatur oleh Undang-undang, namun pada kenyataannya yang terjadi cukup beragam. Jenis koperasi lebih didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Perkembangan koperasi mula-mula hanya terbatas pada tiga bidang usaha, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi, namun lama-kelamaan bertambah luas sesuai dengan keperluan masyarakat.

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 15, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder.

Bentuk dan jenis kegiatan ekonomi ini beraneka ragam, sesuai menurut kemampuan usaha dari koperasi itu masing-masing dan langsung berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan bersama para anggota.

Jenis dan bentuk usaha sudah ditetapkan sebelumnya dalam anggaran dasar koperasi. Jadi sebelum berusaha para anggota dan pengurus koperasi telah sepakat/kepentingan apakah dari para anggota yang paling mungkin dilaksanakan melalui usaha koperasi dengan mengingat kemampuan lokal yang ada, keahlian untuk mengelola usaha, kemampuan manajemen dan kemampuan lainnya yang dapat menjamin kelangsungan usaha koperasi.

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik yang tertentu pula. Dalam perkembangannya jenis koperasi yang berkembang cenderung bervariasi. Keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan

yang ingin dicapai masing masing koperasi. Koperasi kemudian dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok besar berdasarkan pendekatan. Dan dalam masing-masing kelompok besar dapat digolongkan kedalam kelompok –kelompok kecil yang lebih khusus.

1. Pengelompokkan kopersai berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggota. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantungada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan. Selain itu dapat juga didasarkan atas golongan masyarakat tertentu atau golongan fungsional, misalnya koperasi konsumsi karyawan tertentu.
- b. Koperasi produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi bahan jadi/setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri. Koperasi produksi dapat dibedakan menurut lapangan usaha, misalnya koperasi pertanian, koperais peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan industri. Atau dapat juga didasarkan atas macam barang yang dihasilkan. Koperasi-koperasi yaang termasuk koperasi pertanian adalah koperasi padi dan palawijaya, koperasi kopra, koperasi tembakau dan lain sebagainya.
- c. Koperasi pemasaran adalah koperasoi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya. Dalam barang-barang yang hasilnya. Tujuannya dalah untuk menyederhanakan mata rantai mata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
- d. Koperasi kredit/simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dijaminkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Au golongan masyarakat dari para anggota.

Koperasi kredit ada yang berdiri sendiri tetapi ada juga yang kegiatannya itu merupakan sebagian dari kegiatan usaha koperasi yang aneka usaha



(multi purpose), koperasi kredit juga didasarkan atas lingkungan atContohnya adalah koperasi jasa audit, koperasi jasa angkutan, dan lain-lain usahanya. Selain itu koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari rentenir, jeratan para rentenir.

## 2. Koperasi berdasar jenis komoditi

Koperasi yang dibentuk atas jenis komoditi ini hampir sama dengan koperasi-koperasi pertanian, yaitu yang menghasilkan suatu produk tertentu atau didasarkan kepada komoditi yang diusahakan. Koperasi ini biasanya koperasi kopra, koperasi karet, koperasi teh, koperasi perikanan, dan lain-lain. Koperasi-koperasi ini biasanya melakukan kegiatan ekonomi yang multi fungsi yakni selain memproduksi juga mengolah, memasarkan, pengontrolan mutu, pergudangan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi:

- a. Koperasi ekstratif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.
- b. Koperasi pertanian dan peternakan koperasi-koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian. Kegiatan pertanian biasanya meliputi:
  - 1) Pengusahaan bibit, semprotan dan peralatan pertanian lainnya.
  - 2) Mengolah hasil pertanian
  - 3) Memasarkan hasil-hasil olahan komoditi pertanian
  - 4) Menyediakan modal bagi para petani
  - 5) Mengembangkan keterampilan koperasi
- c. Koperasi industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha yang dibanding industri dan kerajinan tertentu. Usahanya meliputi usaha pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.
- d. Koperasi jasa-jasa. Koperasi jasa dibentuk oleh para pemakai dan pemberi jasa guna memanfaatkan jasa koperasi, misalnya koperasi

listrik, koperasi pengangkutan, koperasi perumahan, koperasi asuransi. Selain itu kelima jenis koperasi di atas dapat juga dibentuk koperasi golongan fungsional dan koperasi atas dasar komoditi. Koperasi jasa hampir sama dengan koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah bahwa koperasi jasa mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasukkan kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagaimana koperasi industri, tujuan koperasi jasa adalah untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Contohnya adalah koperasi jasa audit, koperasi jasa angkutan, dan lain-lain.

3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya

Istilah profesi sebenarnya mempunyai arti sebagai jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu berdasarkan kode etika.

Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi:

- a) Koperasi karyawan
- b) Koperasi pegawai negeri sipil
- c) Koperasi angkatan darat, laut, udara, dan polri
- d) Koperasi mahasiswa
- e) Koperasi pedagang pasar
- f) Koperasi veteran RI
- g) Koperasi nelayan
- h) Koperasi kerajinan, dan sebagainya

4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya

Daerah kerja koperasi disini adalah luas-sempit wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan para anggotanya atau melayani masyarakat.

Berdasarkan daerah kerjanya koperasi digolongkan sebagai berikut:

- a) Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.
- b) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai

tujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya.

- c) Koperasi gabungan koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi pusat, koperasi gabungan tidak beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang lebih luas. Contoh: GKBI.
- d) Koperasi induk ialah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara. Fungsinya ialah sebagai penyambung lidas koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dalam lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan koperasi-koperasi sejenis di negara lain ataupun organisasi-organisasi pengusaha pada tingkat nasional dan internasional. Contoh: induk koperasi pegawai negeri sipil (ikpn), induk koperasi karyawan (inkopkar), dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### **PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI**

#### **A. Pendirian Koperasi**

Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan anggotanya, dan masyarakat pada umumnya, Kehadiran koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, justru masyarakat golongan ekonomi lemah masih banyak yang belum memahami pentingnya koperasi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.

Mereka masih memandang koperasi sebagai suatu organisasi yang manfaatnya hanya untuk kepentingan atau menguntungkan bagi golongan masyarakat atas saja. Bahkan tidak jarang dari mereka yang menolak kehadiran koperasi sebagai lembaga ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan harkat dan martabat kehidupan mereka.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan koperasi, Sehubungan dengan hal itu, maka sebelum mendirikan sebuah koperasi. Terdapat juga hal yang penting dan perlu diketahui oleh para pendiri koperasi tersebut yaitu:

- a. Tidak adanya manfaat dari koperasi didirikan jika para pendiri koperasi tidak mengetahui berbagai persoalan.
- b. Walaupun koperasi diketahui dan dimulai oleh 20 orang , namun harus diusahakan sehingga koperasi dapat menerima anggota-anggota baru.
- c. Koperasi tidak dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek melainkan memerlukan waktu lama.
- d. Pembinaan koperasi Indonesia sebagian merupakan tanggung jawab pemerintah. Walaupun demikian dikoperasi tetap milik para anggotanya.

#### **B. Latar Belakang Pendirian Koperasi**

##### **1. Alasan Historis**

Pendirian Koperasi pertama di Inggris dan beberapa negara di Eropa, tidak lepas dari perjalanan historis yang dalam oleh negara-negara laian.

Setelah ratusan tahun hidup didalam tekanan politik dan ekonomi kolonial, bangsa Indonesia mewarisi suatu situasi perekonomian di perekonomian modern yang dikuasai oleh saudagar asing dengan perekonomian rakyat tradisional.

## 2. Alasan Politis

Alasan politis ini bersumber dari pepatah “ Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Apabila orang-orang termasuk golongan ekonomi lemah menyatukan diri dalam suatu badan usaha, maka secara tidak langsung menyatukan dirinya menjadi suatu kekuatan politis.

Dengan bersatu dalam wadah koperasi, maka para petani, pedagang kecil, kaum pengrajin, para nelayan dan sebagainya yang jumlahnya sangat besar di Indonesia, akan memiliki kemampuan usaha yang lebih besar dan akan mencapai kedudukan politis yang lebih kuat dalam masyarakat.

## 3. Alasan Sosiologis

- a) Manusia sebagai makhluk sosial
- b) Manusia selalu ada keinginan untuk bergaul, bersatu atau berkumpul dengan sesamanya
- c) Adanya rasa senasib dan sepenanggungan telah lama ada, hal ini diantara lain tampak pada tumbuhnya lembaga gotong royong sebagai salah satu ciri kultural bangsa kita.

Dalam masyarakat Indonesia adanya rasa senasib dan sepenanggungan telah lama ada. Hal ini antara lain tampak pada tumbuhnya lembaga gotong royong sebagai salah satu ciri kultural bangsa kita. Rasa senasib dan sepenanggungan inilah yang mendorong para pemuda bangsa kita memilih koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat.

## 4. Alasan Ekonomis

Sebagai organisasi ekonomi, pendirian koperasi tidak mungkin dilepaskan dari alasan-alasan ekonomis, yang dimaksud alasan ekonomis ialah pertimbangan kemanfaatan ekonomis yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota koperasi.

Tanpa alasan ekonomis, maka dasar pendirian koperasi serta alasan seseorang untuk menjadi anggota koperasi sulit dipertanggungjawabkan.

Alasan-alasan ekonomis untuk pendirian dan atau menjadi anggota koperasi dalam garis besarnya sebagai berikut:

- a. Menekan biaya usaha

Salah satu alasan terpenting untuk mendirikan dan bergabung menjadi anggota koperasi adalah untuk menekankan biaya usaha. Jika petani

kecil menyatukan usahanya kedalam koperasi unit desa (KUD), maka badan usaha petani tersebut akan berkurang dibandingkan kalau tiap petani mengerjakan usahanya sendir-sendiri.

b. Meningkatkan pelayanan kepada anggota

Salah satu tujuan koperasi adalah memberikan atau meningkatkan pelayanan kepada para anggota. Jasa-jasa ini sebelumnya sulit diperoleh. Sebagai contoh, koperasi pertanian sebagaimana diatas, maka sebelum bersatu dalam koperasi, para petani tidak dapat menikmati manfaat dari pembelian pupuk bersama.

c. Membuka kesempatan bergabung dalam suatu badan usaha

Dengan menjadi anggota koperasi, maka orang yang bermodal kecil akan terangkat harga dirinya. Sebagai anggota koperasi ia berhak ikut serta menentukan jalannya erusahaan bersam-sama dengan anggota lainnya yang turut dalam rapat anggota. Pendek kata dengan ikut seratnya orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominy dalam koperasi akan memberi peluang bagi mereka untuk ikut serta secara aktif adlam membeangun perekonomian. Secara ekonomi penggabungan kepentingan beberapa orang kedalam koperasi akan memungkinkan adanya sinergi. Berusaha memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan.

## 5. Alasan Yuridis

Alasan seseorang untuk mendirikan atau bergabung menjadi anggota koperasi tidak dapat dilepaskan dari alasan yuridis. Alasan yuridis merupakan landasan yang menjamin pendirian koperasi serta pelaksanaan kegiatannya didalam suatu negara.

Alasan yuridis ini merupakan dasar yang secara langsung ikut menciptakan tumbuhnya iklim berkoperasi di suatu masyarakat, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk bersatu dan bekerjasama pada badan usaha koperasi.

Secara hukum pendirian koperasi diberbagai negara di atur dan dilindungi oleh UUD khususnya koperasi. Namun dapat dipastikan bahwa pada setiap negara tempat tumbuh dan berkembangnya koperasi, terdapat peraturan yang mengatur keberadaan koperasi beserta segala hak kewajibannya.

Adapun alasan yuridis pendirian koperasi di Indonesia dapat dilihat pada beberapa produk hukum seperti UUD 1945, UU koperasi dan ketentuan lain yang berkaitan dengan koperasi.

### **C. Langkah-langkah pendirian koperasi.**

1. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendirikan sebuah koperasi adalah:
  - a. Mengadakan pertemuan pendahuluan.
  - b. Mengadakan penelitian mengenai lingkungan.
  - c. Menghubungi kantor departemen koperasi setempat.
  - d. Membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  - e. Mengadakan rapat pembentukan koperasi.
  - f. Mengajukan permohonan status badan hukum koperasi.

#### **2. Pelopor Pendirian Koperasi**

Pelopor adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang perkoperasian serta mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam bidang kehidupan masyarakat.

Mengingat Pentingnya kehidupan kedudukan para pelapor dalam mendirikan koperasi, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seseorang pelapor yaitu:

- a) Memiliki minat yang besar, bercita-cita tinggi, dan mempunyai jiwa kemasyarakatan yang tebal.
- b) Memiliki peranan dan tugas koperasi yaitu untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan tanggungjawab, dan mempertinggi tahap hidup masyarakat.
- c) Memiliki keberanian, keuletan, kerajinan yang sangat baik untuk menggapai keberhasilan dalam visi misi koperasi tersebut.
- d) Memiliki integrasi yang tinggi.

#### **3. Meneliti lingkungan daerah kerja koperasi**

Tujuan meneliti lingkungan daerah kerja koperasi adalah untuk mengidentifikasi masalah sosial ekonomi yang terdapat pada daerah kerja tersebut, masalah-masalah yang perlu diteliti sehubungan lingkungan daerah koperasi.

- a) Masalah rata dan tidaknya tingkat penghidupan rakyat tempat koperasi didirikan.
- b) Masalah yang dialami rakyat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, prioritas pemecahannya, bentuk dan jenis koperasi yang perlu didirikan.
- c) Masalah hambatan yang timbul dapat merintangi pembentukan koperasi.
- d) Masalah pernah atau belumnya koperasi didirikan di daerah kerja tersebut, dan faktor yang menyebabkan kegagalan koperasi tersebut.

Sedangkan masalah yang perlu diteliti sehubungan dengan calon anggota koperasi yaitu:

- a) Apakah para calon anggota koperasi mampu memenuhi persyaratan.
- b) Apakah kemampuan produksi anggota koperasi bisa memenuhi syarat untuk menjamin kelancaran usaha koperasi sehingga koperasi dapat menutup semua biaya operasinya dan mampu memperoleh SHU.
- c) Apakah tingkat hidup dan tingkat pendidikan para calon anggota yang akan bergabung memungkinkan dimintanya bantuan modal dan tenaga sehingga memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan usaha.

#### 4. Menghubungkan kantor Departemen Koperasi dan PKM

- a) Menjelaskan/menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh para pendiri koperasi tentang kekayaan usaha koperasi di wilayah tersebut.
- b) Membahas anggaran dasar, hubungan pemerintah dengan koperasi, seperti pemberian bantuan teknis, permodalan dan hal lainnya.

#### 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 UU No. 25/1992, anggaran dasar koperasi setidaknya harus mencantumkan hal-hal berikut:

- 1) Daftar nama pendiri,
- 2) Nama dan tempat kedudukan koperasi,
- 3) Maksud, tujuan dan bidang usaha koperasi,
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai syarat keanggotaan, pembagian SHU.



6. Mengadakan rapat pembentukan koperasi.

Pengadaan kunjungan konsultasi kepada pejabat koperasi, para pendiri mempelajari pedoman anggaran dasar koperasi. Bila isinya telah dipahami, mereka kemudian membentuk sebuah panitia di kalangan para anggota yang bertugas mempersiapkan pembentukan koperasi. Tugas panitia ini dalam garis besarnya adalah:

- a) Mengadakan persiapan pembentukan koperasi,
- b) Mengundang calon-calon anggota koperasi yang memenuhi syarat keanggotaan untuk menghadiri rapat, pembentukan koperasi,
- c) Mengundang pemuka masyarakat di lingkungan kerja koperasi untuk hadir dalam rapat tersebut,
- d) Mengundang pejabat koperasi dan para pejabat pemerintah setempat untuk memberikan pengarahan dalam rapat pembentukan koperasi
- e) Mempersiapkan anggaran dasar koperasi untuk dipelajari oleh para calon anggota, sehingga rapat pembentukan dapat menyampaikan pertanyaan dan usulan yang diperlukan.

7. Mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi.

Mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum koperasi, maka pengurus koperasi harus melakukan berbagai langkah sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan kepada pejabat mengenai akta pendirian yang dibuat rangkap 2 bermaterai, bersamaan dengan pengetikan berita acara tentang rapat pembentukkan koperasi.
- b) Membenarkan akan kepedulian dalam bekerja agar pengesahan tersebut menjadi amanah dalam pendirian koperasi.
- c) Menjadikan surat-surat yang diperintahkan oleh pihak badan hukum koperasi maka harus dengan amanah sebagai pendiri menjalankan dengan baik.

#### **D. Keanggotaan Koperasi**

Mengacu pada UU perkoperasian Tidak: 25 Thn 1992 prinsip-prinsip koperasi tentang anggota adalah itu Rapat bersifat sukarela dan terbuka, maksudnya disini adalah itu menjadi anggota koperasi tidak boleh tertunda oleh siapa permainan kata-kata dan tidak ada memang atau diskriminasi dalam bentuk apapun jadi setiap warga negara Indonesia yang telah mampu melakukan tindakan hukum, juga telah memenuhi persyaratan bahkan ditentukan di dalam anggaran dasar koperasi, berhak

untuk masuk menjadi anggota koperasi melalui partisipasi aktif di dalam usaha pengembangan koperasi yang dimasukinya. Sebagai suatu perkumpulan, koperasi tidak akan terbentuk tanpa anggota sebagai tulang punggungnya. Semakin banyak anggota maka semakin kokoh kedudukan koperasi. Alasannya badan usaha koperasi dikelola juga dibiayai oleh para anggota, hal ini terlihat dari pemasukan modal koperasi yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota, yang dikelompokkan sebagai modal sendiri atau modal keadilan.

Disamping itu menurut ketentuan Pasal 17 ayat ( 1 ) UU No.25 Tahun 1992, dinyatakan itu anggota koperasi Indonesia adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi berdasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas. Anggota bagaimanapun aktif dalam Kegiatan Koperasi. Sekalipun bagaimanapun, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi bisa pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat Kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi. Adapun bentuk-bentuk partisipasi anggota adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai pemilik anggota memiliki sisa untuk turut aktif dalam pengambilan keputusan, evaluasi dan kendali.
- b) Sebagai pemilik anggota koperasi memiliki sisa menyedot simpanan untuk modal koperasi
- c) Sebagai pelanggan atau pengguna anggota berhak dan sekaligus berkewajiban memanfaatkan pelayanan barang/jasa dari koperasinya.

Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait keanggotaan koperasi yang ada di UU No.25 tentang Perkoperasian :

- a. Pasal 17 di jelaskan bahwa : (1) Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi; (2) keanggotaan koperasi di catat dalam buku daftar anggota
- b. Pasal 18 di jelaskan bahwa : (1) yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana di tetapkan dalam anggaran dasar; (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya dalam anggaran dasar.
- c. Pasal 19 di jelaskan bahwa : (1) Anggota koperasi di dasarkan dalam kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi; (2)

Keanggotaan koperasi dapat di prolehatau di akhiri setelah persyaratan sebagaimana yang telah di atur dalam anggaran dasar di penuhi; (3) Keanggotaan koperasi tidak dapat di pindah tangankan; dan (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana di atur dalam anggaran dasar AD

### **1. Sifat Keanggotaan Koperasi**

Bersifat sukarela dan terbuka, Sifat sukarela memberikan arti setiap anggota koperasi yang mendaftar sebagai anggota koperasi atas dasar kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sifat sukarela ini bisa juga diartikan dapat meminta pengunduran diri jika, ia tidak akan menerima manfaat dari usaha koperasi itu atau karena alasan lain seperti kesibukan sehari-hari yang menyebabkan ia tidak memiliki waktu untuk koperasi. Sifat terbuka mengandung arti setiap orang yang mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh koperasi yang berhak untuk ikut serta dalam koperasi. Sifat ini juga diartikan sebagai bagian dari koperasi yang tidak terkait harus ada yang ikut dalam koperasi dan tidak ada bagian dalam bentuk apapun.

Keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka, tidak berarti bahwa harus bisa masuk ke anggota koperasi jadi saja. Tetapi, diperlukan persyaratan yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota koperasi. Diantara syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota koperasi adalah memiliki kewarganegaraan Indonesia, dewasa, bersedia melakukan sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART), telah melakukan pembayaran dari simpanan koperasi.

Selain dari persyaratan tersebut, setiap koperasi juga memiliki persyaratan khusus, yang sesuai dengan persyaratan ekonomi. Contohnya adalah koperasi perkebunan, dimana koperasi memiliki persyaratan khusus untuk anggotanya yaitu harus terdiri dari pemilik kebun dan pengolah kebun.

Untuk bisa menjadi anggota sebuah koperasi, mereka harus mencari maksud dan tujuan dari koperasi yang dimaksudkan, dimana maksud dan tujuan itu harus dilakukan oleh anggota koperasi. Namun, dalam realitanya, ada anggota koperasi yang tidak tahu tentang maksud dan tujuan koperasi yang dijalankan, bahkan ada anggota koperasi yang harus meminta izin tetapi harus dilakukan malah diminta. Oleh karena itu, persyaratan-persyaratan menjadi anggota koperasi, hak juga diperlukan juga harus disetujui dengan baik, agar dilakukan sebagai anggota koperasi secara sukarela tanpa ada pemaksaan dari upaya.

## 2. Status dan Motif Anggota Koperasi

Status anggota koperasi sebagai badan usaha adalah sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pemakai (*users*). Sebagai pemilik kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sebagai pemakai anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang telah di selenggarakan koperasi.

Keanggotaan koperasi menjadi basis utama bagi perkembangan dan kelanjutan hidup usaha koperasi. Sebagai konsekuensinya persyaratan keanggotaan koperasi harus lebih selektif dan di tetapkan kualitas minimal anggota. Calon anggota paling tidak memenuhi 2 kriteria berikut:

- a) Calon anggota tersebut tidak lagi berada dalam tingkat kehidupan di bawah garis kemiskinan atau orang tersebut paling tidak mempunyai potensi ekonomi ataupun kepentingan ekonomi yang sama. Ini berarti bahwa calon anggota haruslah mempunyai aktivitas ekonomi
- b) Calon anggota ekonomi harus memiliki pendapatan (*income*) yang pasti, sehingga dengan demikian mereka dapat dengan mudah melakukan investasi pada usaha koperasi yang mempunyai prospek.

Dampak dan persyaratan kualitas anggota tersebut adalah bahwa setiap orang akan menjadi anggota koperasi akan terdorong menjadi kan *kebutuhan ekonomi* sebagai motif dasar . Sangat sulit koperasi berkembang dan mampu bersaing di pasar global apabila kedua kriteria minimal di atas dapat dipenuhi. Struktur permodalan koperasi akan tetap menjadi lemah dalam pengembangan usahanya. Kendati usaha tersebut pun memiliki prospek yang sangat potensi.

## 3. Hubungan Anggota Dengan Usaha Koperasi

Selalu ada hubungan antara pengusaha koperasi dengan anggota mereka dengan segala kepentingan mereka yang dapat di pahami oleh usaha koperasi, Alasannya seperti dimana seseorang yang telah menjadi anggota koperasi mereka untuk meningkatkan kehidupannya menjadi lebih sejahtera lagi.

### 1) Kewajiban dan hak anggota koperasi

#### a. Kewajiban anggota koperasi

Terkait dengan pasal 20 UU No. 25/1992 tentang keharusan anggota untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi AD dan ART koperasi

2. Berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
3. Mengembangkan dan memperbaikinya berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. Hak anggota koperasi

Dalam garis besar, hak-hak anggota koperasi , yaitu :

1. Hak untuk menghadiri, menyetujui, dan memberikan suara dalam rapat anggota
2. Memilih / Memilih menjadi pengurus
3. Meminta rapat dewan sesuai ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar
4. Mengundang pendapat / saran-saran untuk pengurus di luar rapat anggota

## 2) Syarat-Syarat Khusus

Ialah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota koperasi sebelum diterima menjadi anggota koperasi secara penuh.

Contoh syarat-syarat khusus:

a. Koperasi Pertanian

Anggota terdiri dari para pemilik atau penggarap sawah dan para pekerja koperasi itu sendiri.

b. Koperasi Nelayan

Para anggotanya terdiri dari para pemilik perahu/kapal, pemilik alat-alat penangkap ikan, dan para nelayan penangkap ikan.

c. Koperasi Karet

Para anggotanya terdiri dari para petani, pemilik, dan pekerja kebun karet, para penyadap yang menguasai hasil produksinya, dan sebagainya.

## 3) Permintaan Menjadi Anggota Koperasi

Setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi dan mengikuti koperasi harus mempelajari segala aturan dan segala syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu dan tujuan koperasi, terutama yang harus di pelajari mengenai syarat-syaratkeanggotaan, hak dan kewajiban yang telah di tentukan sebagai anggota koperasi. Jika calon anggota sudah memahami dan mempelajari semuanya dan dapat menerima syarat-syarat yang berlaku pada

saat ini , maka selanjutnya ia harus menyampaikan permintaan dengan alasan yang pantas untuk di terimasebagai anggota secara tertulis, setelah itu barulah pengurus koperasi meneliti kelengkapan persyaratan para calon anggota, baik berdasarkan ketentuan UU atau AD koperasi.

#### **4) Bukti Keanggotaan Koperasi**

Penerimaan seorang calon anggota koperasi harus dibuktikan oleh pengurus segala persyaratan mereka dengan mencatatnya di buku daftar anggota koperasi. Buku daftar anggota koperasi telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai salah satu buku daftar yang harus ada pada setiap koperasi.

#### **5) Rapat Anggota :**

- a) Adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.
- b) Merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.
- c) Dalam rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak suarayang sama yaitu, satu anggota satu suara.
- d) Harus diselenggarakan diselenggarakan minimal minimal satu tahun sekali.
- e) Ditentukan jumlah quorum, fungsi dan wewenang rapatanggota.
- f) Perlu diatur ketentuan yang membedakan antara rapatanggota dan rapat anggota luar biasa.
- g) Rapat Anggota Anggota merupakan merupakan perwujudan perwujudan dari karakteristik karakteristikkoperasi, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagaipengguna jasa koperasi.

#### **6) Berhenti Sebagai Anggota Koperasi**

Keanggotaan seseorang akan berakhir jika yang bersangkutan :

- 1. Meninggal dunia
- 2. Minta berhenti atas kehendak sendiri
- 3. Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan
- 4. Dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.

#### **E. Pembubaran Koperasi**

Kapan koperasi bubar? Pembubaran koperasi bisa disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam koperasi, berdasarkan ketentuan di dalam Bab XUU No.25/1992:

“pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan 2 alasan (a) Karena para anggota koperasi menghendaki pembubaran koperasi, dan (b) Karena Keputusan.”

Rapat anggota koperasi memang menghendaki koperasi dibubarkan. Pembubaran koperasi atas kehendak para anggota harus dilakukan melalui rapat anggota. Koperasi dibubarkan atas keputusan pemerintah.

Pemerintah dapat mengeluarkan surat keputusan pembubaran koperasi jika:

- a) Terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi berbagai ketentuan yang ada dalam UU koperasi yang berlaku.
- b) Kegiatan-kegiatan koperasi ternyata bertentangan dan mengganggu ketertiban umum dan kesulitan.
- c) Pemerintah memandang bahwa kelangsungan hidup koperasi tidak dapat dipertahankan.

Tata cara pembubaran koperasi diantaranya yakni:

- a. Pembubaran atas kehendak sendiri

Langkah-langkah pembubaran koperasi atas dasar kehendak para anggotanya adalah:

1. Koperasi tersebut mengadakan rapat anggota yang membahas pembubaran.
2. Pengurus menyampaikan keputusan rapat anggota mengenai perubahan koperasi tersebut kepada pejabat dilingkungan departemen koperasi dan PKM.
3. Setelah permohonan pembubaran diterima oleh pejabat yang berwenang, maka selanjutnya pejabat Departemen koperasi dan dengan mengeluarkan surat keputusan pembubaran.

- b. Pembubaran atas kehendak pemerintah

Pembubaran atas kehendak pemerintah hanya dilakukan bila koperasi telah benar-benar terbukti melanggar UU atau peraturan yang berlaku. Dalam hal pelanggaran UU atau peraturan terjadi semata-mata karena kesalahan koperasi, maka langkah-langkah pembubaran oleh pemerintah akan dilakukan dengan berbagai cara berikut

1. Dilakukan penelitian untuk memperoleh bukti- bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan benar- benar telah melanggar ketentuan didalam undang- undang atau peraturan lainnya.
2. Bersamaan dengan dilakukannya penelitian, pemerintah juga melakukan berbagai pencatatan tentang kekayaan yang menjadi hak koperasi.
3. Atas dasar penelitian tersebut, pejabat yang berwenang membubarkan koperasi akan mengirim surat pembubaran kepada koperasi tersebut.
4. Pada saat yang bersamaan dengan pengiriman surat pemberitahuan pembubaran tersebut, dikirim pula usul pembubaran kepada pejabat yang berwenang.

Dalam hal pelanggaran undang- undang atau peraturan yang terjadi karena diberlakukan undang- undang atau peraturan baru, maka pada dasarnya semua koperasi harus menyesuaikan diri dengan berbagai ketentuan yang ada didalam undang-undang yang baru. Sedangkan untuk koperasi-koperasi yang tidak menyesuaikan undang-undang baru tersebut dengan sendirinya terpaksa dibubarkan.



## **BAB VI**

### **ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI**

#### **A. Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi**

Seperti organisasi-organisasi pada badan usaha yang lainnya maka organisasi dalam kegiatan usaha koperasi juga harus ada alat pelengkapannya. Namun demikian alat kelengkapan yang dimiliki usaha koperasi tentunya berbeda dengan alat kelengkapan badan usaha yang lain, karena memang secara konsep berbeda.

Menurut UU No.25/1992 Alat kelengkapan organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur yaitu, Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus Koperasi, Pengawas Koperasi dan bila memungkinkan dapat mengangkat Manajer Koperasi yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Pengurus dan pengawas koperasi adalah anggota yang dipilih melalui RAT, sedangkan manajer adalah tenaga profesional non anggota.

Koperasi merupakan kegiatan usaha, dimana anggota koperasi bekerja triple, yaitu sebagai pemilik, sebagai produsen atau pemasok barang-barang untuk koperasi, dan juga sebagai konsumen atau pembeli barang-barang dari koperasi. Dengan demikian semua anggota koperasi diuntut untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota, terutama mereka yang bertindak sebagai perangkat organisasi maka diharapkan koperasi yang mereka bangun akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang di cita-citakan.

Anggota koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka koperasi harus memiliki alat perlengkapan organisasi. Alat perlengkapan koperasi sebagaimana di ketahui adalah pilar-pilar yang akan menentukan maju mundurnya koperasi.

Pengurus adalah pelaksanaan usaha koperasi yang bertanggungjawab kepada rapat anggota. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran demi kemajuan ekonomi. Manajer adalah orang yang di beri wewenang dan kuasa untuk mengelola dan bertanggungjawab kepada pengurus koperasi. Ada 3 alat perlengkapan organisasi koperasi, dan apabila seorang Manajer Koperasi dibutuhkan, yaitu:

##### **1) Rapat Anggota**

Secara umum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, karena anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan pula manajer. Oleh karena itu, tidak salah

dikatakan bahwa kunci keberhasilan koperasi terletak pada anggota. Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka koperasi harus memiliki alat kelengkapan organisasi. Alat kelengkapan organisasi sebagaimana diketahui ialah pilar-pilar yang menentukan maju mundurnya koperasi. Salah satu pilar organisasi dalam kegiatan usaha koperasi adalah Rapat Anggota. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.

a) Pelaksanaan Fungsi dan Peranan Anggota

Secara konkrit dan terinci sebagaimana telah di tegaskan dalam pasal 33 UU No.25/1992, pelaksanaan fungsi dan Peranan Rapat Anggota tertuang dalam tugas-tugas Rapat Anggota adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.  
Pada umumnya anggaran dasar koperasi akan mengatur beranggota hubungan para anggota dengan usaha koperasi, dan segala hak dan kewajiban anggota koperasi. Sedangkan anggaran Rumah Tangga berisikan penjabaran secara lebih terperinci dari Anggaran Dasar, sehingga ART sifatnya melengkapi dari apa yang belum termuat dalam AD. Biasanya ART disusun atas dasar pengalaman dalam melangsungkan kehidupan koperasi.
2. Menetapkan Kebijakan Umum. Kebijakan umum merupakan garis garis besar haluan koperasi yang akan di tempuh guna mencapai tujuan koperasi yang telah di tetapkan dalam AD. Kebijakan umum ini secara relative tidak berubah-ubah untuk jangka tertentu (+sampai 5 tahun). Fungsi Kebijaksanaan Umum ini sebagai petunjuk arah dari kegiatan koperasi.
  - a. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas (kalau di perlukan)
  - b. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. Rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi berfungsi sebagai Pedoman Kerja Pengurus dalam melaksanakan kepemimpinan koperasi setiap tahun.

- c. Menilai dan Mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya. Dari Laporan Tahunan Pengawas, Rapat Anggota telah memperoleh masukan guna menilai dan akhirnya mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus.
- d. Menetapkan Pembagian SHU
- e. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

b) Yang Berhak Hadir Pada Rapat Anggota

Rapat anggota koperasi diselenggarakan sedikitnya setahun sekali guna meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melakukan tugasnya. Selain itu, rapat anggota juga akan membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk tahun buku yang akan datang. Sesuai dengan ketentuan organisasi koperasi yang berhak hadir pada rapat anggota ialah:

- 1. Para anggota yang namanya terdaftar dalam buku anggota
- 2. Mengurus koperasi pengawas koperasi dan penasehat
- 3. Pejabat koperasi/pemerintah yang berdasarkan UU koperasi berhak hadir pada rapat anggota untuk memberikan bimbingan dalam upaya mengembangkan koperasi.
- 4. Peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya koperasi.

c) Yang mempunyai hak suara pada rapat anggota,

Yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota hanya anggota. Termasuk juga dalam pengertian anggota ialah anggota anggota yang duduk dalam kepengurusan koperasi, mereka berhak menyampaikan pendapat berbentuk saran dan usulan didalam proses pengambilan keputusan dalam kedudukannya sebagai anggota. Pengurus tidak berasal dari anggota koperasi tidak berhak memberikan suara didalam mengambil keputusan.

d) Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Anggota

Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat I UU No.25/1992, bahwa keputusan rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah diantara para anggota dalam upaya mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah mencapai mufakat dan mungkin dapat dicapai, maka sesuai dengan bunyi

ayat 2 UU No.25/1992, "pengambilan keputusan rapat anggota dilakukan berdasarkan suara terbanyak (voting)". Dalam mengambil keputusan dilakukan melalui pemungutan suara, maka setiap anggota koperasi hanya mempunyai hak atas satu suara (one man one vote).

Adapun tata tertib Rapat Anggota Tahunan Koperasi adalah sebagai berikut :

a) Status Rapat

1. Rapat ini adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Rapat Anggota Tahunan adalah kekuasaan tertinggi di koperasi (Anggaran Dasar Pasal 27 ayat 1).
3. Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi : Rapat Anggota Tahunan adalah rapat yang dihadiri oleh wakil-wakil anggota/wakil anggota yang ditunjuk dari masing-masing saksi.

b) Landasan Hukum

1. Landasan hukum Rapat Anggota Tahunan telah diatur oleh UU No. 17 tahun 2012 dan Anggaran Dasar sehubungan dengan kewajiban setiap koperasi untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan dan kewajiban badan Pengurus dan pengawas untuk memberikan pertanggung jawaban atas segala kegiatan koperasi kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan.
2. Sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 1 yang berbunyi : “Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat tiga (3) bulan sesudah tutup tahun buku”.

c) Tujuan Rapat Anggota Tahunan

1. Memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
2. Mempertanggungjawabkan kepada anggota atas segala kegiatan Pengurus dan Pengawas dalam mengelola koperasi selama tahun kerja.
3. Meminta persetujuan dari anggota atas Rencana Kerja Pendapatan untuk periode kerja berikutnya.

d) Syarat Pengambilan Keputusan

1. Setiap wakil anggota yang hadir mempunyai hak suara.
2. Peninjauan dan pengunjungan hanya mempunyai hak berbicara, bila diminta oleh pimpinan sidang dan tidak mempunyai hak suara.
3. Keputusan Rapat Anggota ini sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jika tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

e) Pimpinan Sidang Selama Rapat Anggota Tahunan Berlangsung

Pimpinan sidang Rapat Anggota Tahunan adalah Ketua Badan Pengurus atau yang ditunjuk oleh peserta Rapat Anggota Tahunan dan dibantu oleh wakil ketua Badan Pengurus atau yang ditentukan oleh sidang.

f) Perencanaan Dalam Rapat Anggota Tahunan (Notulen)

Dilakukan oleh sekretaris I dan II Badan Pengurus serta Sekretaris Pengawas. Dalam Rapat Anggota Tahunan salah satu tugas pengurus adalah mengajukan Rencana Kerja untuk tahun berikutnya, yang didasarkan atas usul-usul ataupun keputusan. Rapat Anggota Tahunan itu sendiri, ini berarti Pengurus sejak awal tahun sudah mempunyai rencana kerja setiap tahunnya. Rencana kerja ini dilengkapi dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. Kedua rencana ini digunakan oleh Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan keseluruhan aktivitas koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa rapat anggota telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

2) Pengurus Koperasi

Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dan rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar benar dapat di jalankan. Ada 4 unsur komposisi dalam Pengurus, yaitu: Unsur Ketua (misalnya terdiri Ketua I dan Ketua II); Unsur Sekretaris (misalnya terdiri Sekretaris I dan Sekretaris II); Unsur Bendahara (misalnya terdiri dari Bendahara I dan Bendahara II); Unsur

Pembantu Umum/Komisaris (misalnya terdiri Pembantu Umum I dan Pembantu Umum II).

#### 1. Fungsi Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi mempunyai fungsi idiil ( ideal function ) dan karenanya pengurus koperasi mempunyai berfungsi yang luas:

1. Sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi (Supreme Decision Center Function)
2. Sebagai alat penasehat (advisory function)
3. Sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat di percaya (trustee function)
4. Sebagai penjaga keseimbangan organisasi (perpetuating function)
5. Sebagai simbol ( symbolic function )

#### 2. Persyaratan Menjadi Pengurus Koperasi

Persyaratan untuk biasa dipilih dan diangkat menjadi pengurus diatur dalam anggaran dasar koperasi. Dalam UU No.12/1967, dimana telah disebutkan bahwa syarat-syarat menjadi pengurus koperasi adalah:

1. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja,
2. Syarat-syarat lain yang di tentukan dalam AD koperasi

#### 3. Tugas Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi biasanya bertugas tidak boleh lebih dari 5 tahun. Adapun tugas-tugasnya adalah:

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan rapat anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

#### 4. Wewenang Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi diberikan wewenang yang mendukung tugas dan tanggung jawabnya sebagai administrator pelaksanaan kegiatan. Adapun wewenang tersebut adalah:

Mewakili koperasi jika ada masalah yang melibatkan dalam urusan hukum di pengadilan. Pengurus akan bertindak atas nama koperasi di dalam dan diluar hukum yaitu:

1. Pengurus mewakili perkumpulan koperasi, jika kepentingan koperasi perlu di perhatikan di muka pengadilan.
2. Diluar pengadilan, umpannya koperasi diundang atau di panggil oleh pejabat pemerintah, maka yang akan memenuhi panggilan adalah pengurus.
3. Memutuskan Kelayakan Penerimaan dan Penolakan Seorang Calon Anggota berdasarkan anggaran dasar koperasi.
4. Melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan kemanfaatan koperasi sesuai tanggungjawab sebagai pengurus.

e) Pengurus Koperasi Secara Teratur Mengadakan Rapat-Rapat Untuk Membicarakan Hal Yang Penting, misalnya:

1. Membicarakan kebijakan pelaksanaan keputusan rapat.
2. Membicarakan pembagian tugas antar sesama anggota pengurus, sehingga jelas diketahui masing-masing anggota pengurus batas-batas tugas kewajibannya, guna tercapai suatu tata kerja pengurus serasi dan baik
3. Menetapkan tugas-tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dan karyawan lainnya.
4. Menerima petunjuk-petunjuk atau bimbingan-bimbingan dari pejabat pemerintah.

f) Tata Tertib Rapat Pengurus Antara Lain:

1. Maksud dan Tujuan Rapat,
2. Peserta Rapat,
3. Hak Hak Anggota Pengurus,

4. Dasar-Dasar Untuk Mengambil Keputusan,
5. Pimpinan Rapat dan Kewajiban Pimpinan Rapat,
6. Daftar Hadir,
7. Forum Rapat,
8. Berita Acara ,
9. Usul-Usul Yang Dibicarakan Dalam Rapat dan Lain-lain.

Semua rapat pengurus yang telah diselenggarakan harus di catat atau diagendaikan dalam notulen. Dengan demikian setiap keputusan yang telah diambil oleh rapat anggota pengurus, baik masih menduduki jabatannya.

### 3) Pengawas Koperasi

Salah satu perangkat organisasi koperasi Indonesia adalah pengawas. Besarnya terdiri dari 3 orang dengan komposisi salah satu menjadi Ketua (Koordinator) yang lain menjadi anggota. Tugas Pengawas Koperasi adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijakan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Wewenang pengawas koperasi pada dasarnya adalah melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di koperasi, termasuk akuntansi koperasi. Pengawas mempunyai wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi dan pihak-pihak yang dianggap perlu.

Sebagaimana halnya dengan persyaratan umum yang berlaku untuk para pengurus koperasi, anggota pengawas harus memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja. Mengingat fungsi dan kedudukannya dalam pengelolaan koperasi, maka untuk anggota pengawas dapat juga diberlakukan syarat-syarat khusus seperti:

1. Mempunyai kemampuan berusaha
2. Mempunyai sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelompok.
3. Seorang anggota pengawas harus berani mengemukakan pendapatnya.
4. Rajin bekerja, semangat dan lincah.
5. Pengurus mempunyai tugas penting yaitu memimpin organisasi sebagai keseluruhan.



6. Tugas manajer tidak dapat dilaksanakan sebagai tugas sambilan tapi harus dengan penuh ketekunan.

Masa jabatan pengawas diatur dalam anggaran dasar koperasi. Masa jabatan pengurus koperasi, yaitu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Pemeriksaan yang dilakukan atas pengelolaan usaha koperasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pemeriksaan intern yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas koperasi yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektifitas pengelolaan usaha koperasi oleh pengurus.
2. Pemeriksaan ekstern yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar kewenangan koperasi yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan usaha koperasi.

Sasaran pemeriksaan yang dilakukan terhadap jalannya usaha koperasi pada garis besarnya dapat dibedakan atas pemeriksaan bidang organisasi dan manajemen, serta atas bidang usaha, permodalan dan keuangan.

- a. Bidang organisasi ini dan manajemen. Pemeriksaan dilakukan dengan meneliti catatan yang ada pada buku-buku yang diselenggarakan oleh koperasi. Buku ini terdiri dari:
  1. Buku Daftar Anggota
  2. Buku Daftar Pengurus
  3. Buku Daftar Anggota Pengawas
  4. Buku-buku catatan lainnya yang dapat memberikan informasi secara umum mengenai organisasi dan manajemen koperasi.
- b. Bidang usaha, permodalan dan keuangan. Pemeriksaan dibidang ini bertujuan untuk mengetahui bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi di dalam menjalankan fungsinya. Dan juga bertujuan untuk mengetahui jumlah modal koperasi serta dari mana modal itu diperoleh. Hal ini penting untuk menilai keluwesan (fleksibilitas) usaha koperasi dalam perkembangan

keadaan ekonomi yang dapat berubah serta penting dalam melakukan analisis kekuatan dan kelemahan koperasi.

#### 4) Menejer Koperasi

Koperasi yang sudah maju pada dasarnya memerlukan tenaga manajer yang profesional untuk menjalankan kegiatan usahanya. Peran manajer dikaitkan dengan volume usaha, modal kerja dan fasilitas yang diatur oleh pengurus.

Pengurus bertanggung jawab penuh dan harus memahami keinginan para anggota dan merumuskannya dalam suatu kebijakan. Pengurus boleh memberikan arahan- arahan kegiatan, sedangkan pelaksanaan detilnya harus diserahkan kepada manajer. Manajer profesional dan mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang berada dalam kewenangannya.

Tugas dan kewajiban manajer dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memimpin kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus.
- b. Mengangkat/memberhentikan karyawan koperasi atas persetujuan pengurus.
- c. Membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
- d. Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan.
- e. Mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi.

#### **B. Hubungan Kerja Pengawas, Pengawas, Dan Manajer Koperasi.**

Mengadakan pemisahan yang tegas antara pengurus, pengawas, dan manajer koperasi dibuat pedoman sebagai berikut:

1. Pengurus adalah pelaksanaan usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota.
2. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi.
3. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola, dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi.

Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsumtif secara timbale balik. Hubungan pengawas dengan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dualism badan yang mengurus dan memimpin organisasi serta untuk memperjelas pemahaman antara pelaksanaan dan pengawas.

## BAB VII

### PERANAN MANAJEMEN DI BIDANG KOPERASI

#### A. Pengertian Manajemen Koperasi

Kata manajemen yang kita kenal selama ini berasal dari kata bahasa Inggris *management*. Kata tersebut ternyata berasal dari kata bahasa Italia *maneggiare* yang berarti menangani, sedangkan kata *maneggiare* itu berasal dari kata Latin *manus* yang berarti tangan. Kemudian menjadi kata *to manage* dalam bahasa Inggris artinya mengatur. Dengan demikian, manajemen secara singkat dapat diartikan mengatur.

Kata Manajemen berasal dari bahasa perancis kuno *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Kata manajemen berasal dari *bahasa italia* (1561) *maneggiare* yang berarti “mengendalikan,” terutamanya “mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa perancis *manege* yang berarti “kepemilikan kuda” (yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), dimana istilah Inggris ini menjadi *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

Marry Parker Follet, mendefinisikan manajemen: sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Ricky W, Griffin mendefinisikan manajemen: sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisaian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisiensi bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia saat ini belum ada keseragaman.

Selanjutnya bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
3. Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (Science).

Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, berbeda-beda definisi yang diberikan oleh para ahli. Untuk memperlihatkan tata warna definisi manajemen menurut pengertian yang pertama itu, dikemukakan tiga buah definisi.

Dalam Encyclopedia of the Social Science dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya, Hilman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.

Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen.

Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah seni (Art) atau suatu ilmu pengetahuan. Mengenai ini sesungguhnya belum ada keragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan segolongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat ini sama mengandung kebenarannya.

Menurut G.R. Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen juga suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.

Menurut Mary Parker Follet Manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi dari Mary ini mengandung perhatian pada kenyataan bahwa para manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan itu oleh dirinya sendiri sendiri. Itulah manajemen, tetapi menurut

Stoner bukan hanya itu saja. Masih banyak lagi sehingga tak hanya satu definisi saja yang dapat diterima secara universal.

Menurut James A.F.Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari gambaran diatas menunjukan bahwa manajemen adalah suatu keadaan terdiri dari proses yang ditunjukan oleh garis (line) mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi

G. Terry mendefinisikan bahwa : “Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan”. Lebih lanjut G. Terry menjelaskan fungsi-fungsi Manajemen sebagai berikut:

- a) Planning (Perencanaan)
- b) Organizing (Pengorganisasian)
- c) Actuating (Penggerakan untuk bekerja)
- d) Controlling (Pengawasan/Pengendalian)

Sedangkan kata koperasi berasal dari bahasa latin cooperatio dalam bahasa Inggris menjadi cooperation berarti kerja sama. Co berarti bersama dan Operation berarti bekerja atau berusaha. Dengan demikian, koperasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi bekerja atau berusaha bersama-sama anggotanya untuk mencapai suatu tujuan.

Setelah Anda memahami pengertian manajemen dan koperasi, maka Anda akan saya ajak untuk bersama-sama memahami tentang manajemen koperasi. Tentu Anda mengatakan manajemen koperasi itu ialah manajemen yang diterapkan pada organisasi koperasi. Ya betul, tapi perlu penjelasan lebih lanjut. Sebagai mana Anda pahami bahwa manajemen itu adalah mengatur, berarti mengatur unsur-unsur manajemen dengan memfungsikan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan

koperasi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa manajemen koperasi adalah pengaturan unsur-unsur manajemen dengan memfungsikan fungsi-fungsi manajemen planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing (penyusunan personalia), leading (pengarahan) dan controlling (pengendalian) pada organisasi koperasi untuk mencapai tujuan koperasi.

Hal yang perlu dipahami di dalam tatanan organisasi koperasi terdapat kewenangan dan tanggung jawab mendasar yang tidak dapat lepas dari kehidupannya, bila menamakan dirinya sebagai organisasi koperasi, yakni perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi, pengurus yang mendapat kepercayaan dari anggota untuk mengelola organisasi koperasi dan diangkat oleh rapat anggota, dan selanjutnya badan pengawas yang juga sama dengan pengurus, diangkat oleh rapat anggota dan mendapat kepercayaan dari anggota untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan koperasi.

Manajemen koperasi berlandaskan kekeluargaan dan kegotong-gotongan yang lebih terkenal dengan landasan yang demikian diwujudkan pada sifat manajemen koperasi yang bersifat demokrasi, yaitu :

- a) Kekuasaan tertinggi
- b) Pengurus dan badan pemeriksa
- c) Pembagian sisa hasil usaha
- d) Usaha koperasi

Dengan masalah lebih jauh esensi dan watak yang terkandung dalam lembaga koperasi, akan membuahkan suatu pandangan utuh bahwa koperasi memiliki cakupan multi-dimensional yang bersifat strategis masyarakat menyangkut empat karakteristik secara sekaligus yaitu :

1. Koperasi merupakan suatu sistem normatif sistem karena mekanisme yang berkembang didalamnya tidak terlepas dari pranata sosial budaya masyarakat itu sendiri koperasi adalah manifestasi asas kekeluargaan dan kegotong-royongan yang luas melalui mekanisme dari oleh dan untuk anggotanya.
2. Koperasi merupakan suatu mekanisme pendidikan bagi para anggotanya.

3. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan.

## **B. Prinsip Manajemen Koperasi**

Ada 7 Prinsip manajemen dalam koperasi menurut Peter Davis sebagai berikut :

1. Pluralisme

Terdapat pluralisme dalam kepentingan mereka dan mereka mengakui dan menyadari adanya kepentingan orang lain.

2. Mentalitas

Mencari keuntungan bukanlah hal yang utama, akan tetapi mutualitas dan kemajuan bersama untuk semua anggota koperasi

3. Kemandirian perorangan

Sama seperti organisasi lain pada umumnya, tetapi dalam koperasi menekankan dua hal yaitu kebutuhan organisasi dan otonomi anggota perorangan.

4. Keadilan

Sama untuk koperasi, tetapi lebih mudah dilaksanakan mengingat struktur kepemilikan mereka terhadap koperasi.

5. Keadilan

Sama untuk koperasi, tetapi struktur kepemilikan koperasi dan budaya pertanggungjawaban akan lebih mudah dilaksanakan.

6. Kepedulian terhadap orang

Struktur kepemilikan di dalam koperasi menterjemahkan prinsip ini, melalui basis keanggotaan.

7. Peran ganda pekerjaan dan karyawan

Koperasi menyatukan prinsip ini dengan mengkombinasikan aspek sosial dan komersial. Koperasi memberbolehkan adanya seseorang dengan beberapa peran.

Guna memperjelas hubungan prinsip manajemen dan prinsip koperasi, Dubashi pada tahun 1970 meringkasnya sebagai berikut:



1. Perencanaan : (a) Tujuan memaksimalkan pelayanan, (b) Penetapan bunga terbatas atas modal, (c) Pembagian surplus (SHU) jika ada untuk: Pembentukan modal dan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing
2. Staffing : Keanggotaan sukarela dan terbuka
3. Pengarahan : Demokrasi dalam arti modern
4. Koordinasi Federalisme : kerja sama antar koperasi
5. Pengawasan : Pengawasan demokratis satu orang satu suara, pendidikan anggota
6. Representasi (perwakilan) Netralitas
7. Budgeting (penganggaran): Prinsip demokratis dan transparansi
8. Kriteria efisiensi : Maksimalisasi pelayanan bukan maksimalisasi profit

### **C. Peranan Manajemen dalam Koperasi**

Manajemen koperasi memiliki tugas membangkit potensi dan motif yang tersedia yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknya manusia lainnya. Perangkat organisasi koperasi ada (3) bagian :

#### **1. Rapat Anggota**

Tugas dan wewenang Rapat Anggota :

- a) Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan.
- b) Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.
- c) Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.
- d) Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
- e) Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

#### **2. Pengurus**

Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari :

- 1) Unsur Ketua
- 2) Unsur Sekretaris
- 3) Unsur Bendahara

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pengurus: Secara Kolektif Pengurus bertugas :

- a) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha
- b) Membina dan membimbing anggota
- c) Memelihara kekayaan koperasi
- d) Menyelenggarakan rapat anggota
- e) Mengajukan rencana RK dan RAPB
- f) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan
- g) Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib
- h) Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas.

Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap tahun buku yang disakikan dalam Laporan Pertanggungjawaban tahunan.

Secara Perorangan, tugas pengurus adalah :

a) Ketua :

- 1) Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,
- 2) Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan,
- 3) Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara,
- 4) Bertanggungjawab pada Rapat Anggota

b) Sekretaris :

- 1) Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keanggotaan dan pendidikan.
- 2) Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris.
- 3) Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua.

c) Bendahara :

- 1) Bertugas mengelolan keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan.
- 2) Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendhara.
- 3) Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua.
- 4) Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.

d) Pengawas :

Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD Koperasi. Unsur Pengawas terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota,
2. Sekretaris merangkap anggota dan
3. Anggota

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas :

1) Secara Kolektif

Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus.

Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa.

Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi.

2) Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolektif berdasarkan azas kekeluargaan dan masing-masing melaksanakan tugas dengan disiplin, inisiatif, kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.

3) Pengurus dan Pengawas bekerja secara terbutka.

4) Pengurus adalah menyusun kebijaksanaan untuk dilaksanakan oleh Pengelola (manajer) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan.

- 5) Pengawas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- 6) Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas disajikan tertulis.
- 7) Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas secara perorangan yang telah diterima, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas menjadi tanggungjawab Pengurus atau pengawas.

Tugas dan peranan manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkan potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses “nilai tambah”. Hal itu dapat dilakukan bila sumber dayayang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreatif (inovatif) serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berfikir selangkah lebih maju di dalam memberi manfaat banding pesaing, hanya dengan anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya.

#### **D. Pentingnya manajemen koperasi**

Dalam masyarakat modern dewasa ini manajemen semakin menjadi sangat penting. Artinya masyarakat yang modern itu sendiri merupakan masyarakat yang sangat kompleks, dengan tingkat kecerdasan yang meningkag, pengetahuan teknologi yang semakin berkembang, telah menempatkan rasionalitas, efektivitas dan dilaksanakan efesien sebagai nilai tambah normal yang tinggi.

Dengan sistem normal yang demikian orang yang modern berusaha terus meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuannya atau untuk memenuhi kebutuhannya secara lebih cepat dengan waktu setepat-tepat dan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Tuntutan ini menimbulkan berbagai jenis spesialisasi.

- 1) Spesialisasi dapat terjadi di dalam suatu usaha pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti pembagian pekerjaan harus sesuai dengan keahlian tenaga kerjanya, juta adanya koordinasi kearah pencapaian tujuan usaha.
- 2) Spesialisasi antara usaha dan kegiatan dalam masyarakat. Ini artinya ada spesialisasi usaha atau kegiatan pada suatu bidang tertentu. Yang tentunya ada usaha yang mempunyai spesialisasi yang sama, ini menuntut kemampuan dan

kompetisi dalam menghasilkan jasa atau barang yang lebih baik dan tepat, lebih cepat dan murah, sehingga usahanya dapat diterima dalam masyarakat karena adanya spesialisasi dalam usaha ini, maka diperlukan kemampuan untuk menarik kerja sama dari pihak lain yang langsung ataupun tidak langsung.

Banyak yang berpendapat bahwa manajemen koperasi itu sering terjadi hal-hal yang berlawanan antara satu dengan lainnya. Untuk itu perlu kita lihat, bahwa gagasan idealnya koperasi disatu pihak memberikan pelayanan kepada anggotanya sebaik-baiknya dan dilain pihak sebagai usaha yang bergerak di bidang ekonomi ekonomi harus dapat berusaha seefisien mungkin. Sebagian pendapat bahwa nilai-nilai ideal koperasi yang baik mendasarkan pada kerjasama antara manusia tidak memerlukan manajemen yang tinggi sebab manajemen hakekatnya mencapai tujuan dengan perantara orang lain masih ada kan pandangan yang lain bahwa pada setiap kegiatan perekonomian untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi memerlukan suatu manajemen yang cukup tinggi.

Di sinilah manajemen koperasi sangat penting artinya untuk dapat meningkatkan kemajuan koperasi di Indonesia. Pada manajemen koperasi Indonesia pengurus di dalam menjalankan tugasnya juga memiliki kewenangan yang diperoleh dari rapat anggota bagi dalam aspek idealnya maupun dalam usaha ekonominya. Untuk mengembangkan pengurus men delegasi kan wewenang kepada manajer selangkah aspek organisasi manager membantu pengurus tetapi tidak memutuskan yang menyangkut hubungan dengan aspek idil koperasi dilihat dari sumbernya wewenang yang diperoleh pengurus pada koperasi pada dasarnya dapat berasal dari tinggal sumber yaitu rapat anggota anggaran dasar peraturan-peraturan hukum dan mp3 adalah keahlian di samping itu di Indonesia disebut pulau tradisi sebagai wewenang dengan adanya kelimpahan wewenang tidak berarti tanggung jawab juga dibebankan sebab tanggung jawab ke atas tidak dapat dilimpahkan.

Perkumpulan koperasi merupakan kelompok orang-orang yang mempunyai tujuan untuk memiliki sarana usaha dalam melayani sebaik mungkin apa yang diperlukan oleh anggotanya dengan adanya pelayan ini maka setiap anggota diharapkan kepada mempertahankan usaha masing-masing keuntungan badan usaha koperasi bukan tujuan utama 60 sayang diselenggarakan oleh koperasi senantiasa

menempati mendapatkan selisih antara dan dia yang dihimpun dalam darah cadangan dan digunakan untuk mempertahankan kelangsungan usaha koperasi nya.

#### **E. Tataan Manajemen Koperasi**

Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian mempunyai tataan manajemen yang agak berbeda dengan badan usaha lainnya perbedaan tersebut bersumber dari hakikat manajemen koperasi yang mendasar falsafah hanya adalah dari oleh dan untuk anggota yang mencerminkan pelaksanaan falsafah demokrasi dalam dunia usaha yang menjadi ciri khas koperasi untuk itu di dalam struktur atau tataan manajemen koperasi di indonesia dikenal adanya rapat anggota pengurus dan badan pemeriksa dan manager atau pelaksana utama.

Di dalam manajemen koperasi di indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rapat anggota sebab koperasi adalah organisasi dari oleh dan untuk anggotanya untuk dapat bekerja secara baik pengelolaan koperasi tidak mungkin ditangani oleh seluruh anggotanya. Oleh sebab itu dipilih pengurus yang diharapkan dapat menjalankan usaha koperasi dan agar usaha tersebut berhasil pengawasan nya diserahkan pada badan pemeriksa baik pengurus maupun 4 dan pemeriksa dipilih oleh anggota dan bertindak untuk dan atas nama anggotanya. Untuk pengurusan kegiatan usaha sehari-hari pengurus dapat mengangkat manager hal ini didasarkan ketentuan undang-undang di mana dibenarkan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari pengurus dapat mengangkat orang lain bisa satu orang atau lebih.

Di dalam setiap pengelolaan suatu usaha apabila tidak terdapat suatu teamwork atau satu kesatuan kerja dalam kesatuan bahasa akan mudah terpecah dan perkembangan ding oleh keadaan yang dapat mengakibatkan tidak stabil nya usaha apabila suatu usaha tidak stabil dapat dipastikan bahwa kelangsungan hidup usaha tersebut akan tersendat anda telah dilihat dalam tataan organisasi koperasi pada dewasa ini seandainya ada perbedaan antara pengurus dan manager dirasakan membuat jalannya organisasi terganggu.

Dengan demikian jelaslah bahwa manajemen koperasi adalah manajemen usaha yang pada umumnya diterapkan pada bangun usaha koperasi atau dengan kata lain bagaimana mereka menerapkan pengelolaan usaha ekonomi modern pada usaha koperasi untuk itu salah satu hal yang paling pokok adalah dapat dicapai nya tujuan usaha koperasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di bawah kepemimpinan di manajemen yang terdiri dari pengurus dan badan pemeriksa yang mengawali

mewakili anggota dan manager yang melak melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Untuk melaksanakan pekerjaan itu manager at tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh para pegawai.

Manajemen adalah ilmu dan seni mengerjakan sesuatu dengan perantara orang lain untuk mencapai tujuan usaha. Ilmu dan seni sangat diperlukan karena manager yang baik meminta seseorang bekerja akan dijawab kan dengan tepat diselesaikan pekerjaan dengan menyenangkan oleh sebab itu untuk dapat berhasilnya manajemen koperasi harus jelas dahulu the konsep tujuan sasaran yang harus dicapai sampai waktu tertentu perencanaan dan bagaimana kebijakan-kebijakan harus diletakkan sebagai dasar prosedur kerja yang harus dirumuskan dengan jelas.

Tanggung jawab kita semua untuk masa racikan antara semangat koperasi dengan koperasi sebagai organisasi sehingga koperasi yang diharapkan menjadi tokoh guru ekonomi yang indonesia dapat terwujud oleh karena itu dibutuhkan seperangkat tindakan yang agak mendasar agar koperasi di dudukan dalam cakrawala ekonomi nasional.

Wajah koperasi indonesia dewasa ini mama diwarnai dengan permasalahan. Pak beberapa masalah yang dihadapi koperasi di indonesia :

1. Telah terjadi suatu pergeseran nilai nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi derajat kepentingan usaha bersama yang merupakan asas koperasi.
2. Belum adanya penentuan yang tegas dalam kegiatan ekonomi yang mana koperasi di mintakan peranannya.
3. Koperasi belum mempunyai daya tarik yang kuat sebagai lapangan kerja yang profesional.
4. Peraturan yang dikeluarkan berbagai instansi banyak pula yang disertai dirasakan kurang mendorong dan membantu koperasi

## **BAB VIII**

### **DUKUNGAN MANAJEMEN TERHADAP KOPERASI**

#### **A. DUKUNGAN ANGGOTA TERHADAP KOPERASI**

Koperasi yang memasuki lingkup kegiatan Produksi, pengadaan dan distribusi merupakan suatu penyelenggaraan dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat dalam gerakkemajuan ekonomi nasional yang menyeluruh. Sehingga jelas bahwa tata penyelenggaraan kegiatan usaha Koperasi tidak dapat dipisahkan dengan seluruh tata penyelenggaraan kegiatan ekonomi nasional serta justru harus diarahkan, diselaraskan, ditunjang, didukung dan dibina oleh tata system masyarakat (Pemerintah/ Negara) dalam kaitan pembangunan ekonomi nasional. Kekayaan dan potensi ekonomi bersama dengan peran serta masyarakat dikerahkan untuk membangun ekonomi nasional.

Dalam pengertian modal kegiatan usaha Koperasi merupakan pencerminan dari modal nasional, yang hakikatnya adalah sumber daya potensi dan peran serta masyarakat (*integral national resources*) yang dapat dikerahkan dalam pembangunan system masyarakat sebagai kekuatan yang mampu menggerakkan dan digerakkan dalam proses pertumbuhan dan peningkatan efektif.

Tersedianya dana adalah bagian dari modal tersebut disamping itu ada modal-modal lainnya seperti tenaga manusia, keterampilan keahlian, pengalaman serta kepribadian bangsa, martabat budaya dan secara sinkron utuh dan menyeluruh dalam kerangka pelaksana kegiatan ekonomi. Kerangka pelaksanaan kegiatan ekonomi disini berarti bahwaterdapat kegotong royongan secara menyeluruh dalam rangkaian kaitan kegiatan koperatif.

Gotong royong juga harus tercermin dalam cara penanganan dalam praktek kegiatan usaha. Sejalan dengan konsep modal kegiatan usaha Koperasi tersebut di atas dapatlah kemudian dihayati bahwa dalam tatanan usahanya memerlukan kerangka penanganan tertentu yang sesuai dengan penyelenggaraan yang efektif. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang misalnya perlu mendapatkan penyesuaian sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan pola kebersamaan yang dimaksud, yaitu bahwa pelimpahan dan distribusi tugas dan tanggung jawab tidak boleh mengandung arti kedudukan orang seorang yang menjurus pada kedudukan exclusive sehingga dapat menggambarkan dominasi para individualis.



Kegiatan usaha Koperasi bukan sekedar usaha yang mengandalkan tekad prestasi individual orang-orang dimana keuntungan adalah hasil guna dari mereka yang terlibat dalam kegiatan usaha, melainkan merupakan usaha bersama untuk menuju kesejahteraan bersama. Maka sejak awal penjelmaan Koperasi menekankan penyatuan sumberdaya potensi dan peran serta kegiatan yang dikerahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pencapaian peningkatan kesejahteraan adalah tujuan usaha yang bermamfaat dalam usaha Koperasi serta merupakan karya kegiatan dalam rangka tanggung jawab moral dan social seperti tersebut diatas. Dengan kata lain maka tujuan usaha Koperasi adalah membuat karya yang dapat memberikan sumbangan kesejahteraan yang bermamfaat. Membuat karya adalah motif karya Koperasi dalam kehidupan gotong royong dan manfaat dalam kesejahteraan merupakan sendi integral dalam kesejahteraan hidup dimana keuntungan merupakan bagian dari sarana kemanfaatan seperti itu.

Koperasi dengan demikian merupakan wahana persatuan yang efektif dan produktif. Wahana persatuan yang efektif dalam penyertaan dalam bentuk usaha bersama itu merupakan keberhasilan dan penerapan asas kekeluargaan dalam kehidupan ekonomi yang otokratif. Peran serta kegiatan yang di persekutukan dalam koperasi kemudian menjadi peran usaha kooperatif gotong royong.

Koperasi tidak mengutamakan kelayakan usaha (seperti penilaian usaha yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan), tetapi lebih menekankan pada persetujuan "menyetujui usaha" yang membahas tersedianya sumber daya potensi dan peran usaha yang disediakan dan dikerahkan dalam karya usaha bersama atas asas kekeluargaan tersebut. Maka jelas itu bukan motif usaha Koperasi tidak terkotak pada kelayakan yang dapat menguntungkan, di mana dorongan usaha ditentukan oleh permintaan pasaran dari hasil usaha. Atau pun bukan merupakan pemenuhan kebutuhan dan saling bergantung usaha, yang didukung dimensi yang merupakan kegiatan usaha yang mengkaitkan luasnya dengan tingkat keterkaitan ekonomi masyarakat secara integral. "Tidak ada bedanya dengan usaha-usaha Swasta non-Koperasi, juga Koperasi membutuhkan tenaga-tenaga yang baik, tidak hanya tenaga-tenaga kerja, tetapi juga tenaga pelaksana. sebagai badan yang bergerak di bidang ekonomi, juga segi-segi empat harus dibina sesuai dengan dasar-dasar komersial dan untuk itu perlu tenaga kerja yang cakap, jujur, lincah dan berpandangan jauh. Dengan kompetensi yang dimiliki mengenai segi-segi perkoperasian, terutama cita-citanya yang menyebabkan kekhasan dari pada Koperasi

sebagai upaya yang bercorak ekonomi. Maka dari itu, itulah yang dibutuhkan, demikian Koperasi yang membutuhkan bantuan bagi pengurus dan pegawai-pegawainya. usaha kecil-kecilan, tiadanya kemampuan untuk membayar tenaga yang cakap perkembangan Koperasi kita menyaksikan, itulah mula-mula Koperasi menggunakan tenaga yang tidak dibayar. Adalah persyaratan yang berlaku pada permulaannya Koperasi harus mendapatkan hasil mendapatkan orang-orang yang memiliki jiwa kesosialan yang bersedia menyumbangkan tenaganya.

Bagaimana pun juga, yang paling penting adalah, anggota sangat berkepentingan untuk mendapatkan pelayanan yang murah, sebab pelayan yang murah berarti anggota dengan harga yang sama akan dapat laki-laki membeli barang lebih banyak atau lebih mengerti, akan meningkatkan, Ini mendukung perjanjian kerja sama dengan hemat atau efisien. " Dapat disetujui dengan cara meningkatkan tabungan yang disediakan dengan cara yang disetujui oleh Koperasi. Dengan jumlah anggota yang bertambah yang disediakan oleh Koperasi untuk anggota-anggotanya akan bertambah. Dengan menambah jumlah dana yang dibutuhkan, maka dapat ditingkatkan dengan membeli barang-barang untuk pembelian (grosir) di Koperasi Konsumsi dan jika perlu barang-barang perlu dibuat sendiri yang berarti lebih murah dibandingkan dengan yang harus dibeli dari luar. Dalam hal pemasaran lebih mudah diadakan penilaian dan tindakan-tindakan lainnya yang meningkatkan mutu dan lain-lain pembeli yang lebih besar-besaran (grosir) yang dibayar dengan harga yang lebih tinggi. Pengaruh Sosial Ekonomi Besar Sekali pada hubungan keanggotaan . Di Dalam Penghidupan Pertanian Maka Para Anggota Dari Masyarakat Pertanian akan Tergantung Sekali Hidupnya Satu Sama Lain. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pekerjaan-pekerjaan petani yang volumenya cukup Besar tetapi harus diselesaikan dalam jangka yang relatif Koperasi di Daerah. Tugas yang harus dilaksanakan tinggalah mengusahakan adanya harmoni dan kubuan baik, masing-masing anggota atau orang harus betul-betul mengkinsyafi bahwa Kalau Hal Ini Sampaitidak terdapat dalam masyarakat maka hidup dalam masyarakat se macam itu akan terasa susah sekali.

Akibatnyapun Koperasi akan sukar dapat berhasil meskipun faktor lain yang mendukungnya cukup kuat. Hubungan keanggotaan atau hubungan antara anggota masyarakat satu dengan lainnya di demikian kuatnya hingga walaupun ada orang pandai dari luar akan memimpin mereka akan lebih percaya pada anggota masyarakatnya sendiri. Dengan demikian pendidikan mengenai hubungan keanggotaan akan lebih berhasil kalau diberikan kepada kader-kade yang diambilnya dari masyarakat

mereka tadi. Orang-orang muda dan masyarakat itu biasanya segan untuk kembali dan mengabdikan kepada masyarakatnya. Dengan demikian dapatlah dibayangkan bagaimana sukanya mendapatkan orang-orang yang akan dididik ke arah ini. Sebagai contoh ada seseorang manajer KUD yang telah mendapatkan latihan dan pendidikan yang cukup baik. Tetapi mereka tetap menjalankan tugas-tugas anak muda desa terhadap orang tuanya. Mereka melayani para tamu pembesar dengan memberikan minuman dan sebagainya. Meskipun melayani itu bukanlah pekerjaannya sebagai seorang manajer. Contoh-contoh semacam ini banyak sekali terdapat karena hal semacam ini dianggap biasa sebagai seorang anak muda dari masyarakat itu yang harus mengabdikan atau menghormati orang tua dengan tamu-tamu.

Koperasi harus diurus dan dikemudikan sendiri oleh anggota-anggotanya. Kemudi atau pimpinan koperasi tidak boleh dipegang oleh orang-orang luar/bukan anggota koperasi. Maju atau mundumya usaha koperasi tergantung kepada peran-serta dan kegiatan anggota-anggotanya. Anggota-anggota koperasi bertanggung jawab atas maju atau mundumya usaha koperasi mereka. Pengurus koperasi yang harus mengemudikan dan memimpin serta mengelola usaha koperasi. Pengurus koperasi dipilih oleh dan dari anggota-anggota koperasi dalam Rapat Anggota Koperasi, Kekuasaan tertinggi di dalam perkumpulan koperasi dipegang oleh Rapat Anggota Koperasi. Yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pengurus Koperasi ialah Rapat Anggota Koperasi. Memang Pengurus Koperasi yang harus memimpin dan mengemudikan serta mengelola usaha Koperasi. Namun setiap anggota koperasi meminta bantuan memajukan usaha koperasi mereka. Tanpa ditopang oleh kegiatan dan peran aktif anggota-anggotanya koperasi tidak mungkin maju dan berkembang dengan baik. Jadi baik Pengurus Koperasi atau pun anggota koperasi berkewajiban memajukan usaha koperasi mereka.

Koperasi Indonesia harus mementingkan dan memperhatikan betul-betul pendidikan anggotanya. Usaha-usaha pendidikan dalam bentuk pelbagai bentuk dan isi sangat penting bagi anggota-anggota koperasi. Pendidikan adalah salah satu jalan yang terbaik untuk mempertinggi kesadaran berkoperasi dan meneguhkan keyakinan para anggota sangat bermanfaat yang dapat diberikan oleh koperasi kepada mereka untuk meningkatkan taraf nyata. Harga diri dan kesadaran berkoordinasi yang tinggi menyediakan mental untuk koperasi untuk mengatasi segala kesulitan yang dihadapinya. Seperti yang telah diuraikan tentang kekuatan mental dan moral yang lebih penting bagi koperasi daripada modal atau kapital.

Harga diri dan kesadaran berkoperasi yang dapat diperoleh dan diberikan melalui pendidikan yang disiapkan dan terarah. Oleh karena itu, maka penyuluhan, pembinaan dan pendidikan koperasi kepada anggota-anggota koperasi khusus dan kepada anggota-anggota masyarakat tidak boleh diabaikan, bahkan harus menggunakan program utama di gerakan Koperasi Indonesia. Penyuluhan, pembinaan dan pendidikan koperasi adalah hal yang sangat penting dan besar sekali faedah dan manfaatnya bagi koperasi di dalam membawa kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Dasar-dasar koperasi yang bersumber pada Koperasi Rochdale ini berlaku pula sebagai dasar-dasar Koperasi Indonesia, terutama koperasi-koperasi konsumsi Indonesia. Jadi anggota-anggota koperasi, terutama pengurus-pengurusnya, harus memperluas pengetahuan dan ketrampilannya untuk memulai usaha-usaha koperasi dengan modern, maju, tertib dan teratur. Anggota-anggota Koperasi Indonesia harus dididik bertanggung jawab dan percaya kepada diri sendiri. Koperasi Rochdale telah membuktikan bahwa untuk modal kerja mental dan modal moral pengurus dan anggota anggotanya lebih penting dari pada modal dan kapital.

Sesungguhnya Koperasi Unit Desa sebagai wadah pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan harus dikembangkan dengan perhitungan dan pertimbangan ekonomis. Tingkat pendidikan masyarakat kita, sebagian besar di pedesaan masih rendah. Lagi pula rakyat di desa-desa masih sangat kuat menghadapi kehidupan dan alam pikiran tradisionalnya. Sangat kuat dalam kehidupan dan perjuangan tradisionalnya, maka rakyat di pedes belum percaya mempergunakan daya pikirnya untuk kemajuan dan sukarela mengalihkan tradisionalnya yang terverifikasi ke alam pikiran ekonomi yang rasional dan dinamis. Hal ini perlu untuk dipilih jikalau kita perlu memajukan dan mengembangkan Koperasi Unit Desa sebagai pusat kementerian keuangan. Untuk memajukan dan mengembangkan Koperasi Unit Desa sangat dibutuhkan tenaga pimpinan (Pengurus-Manajer pengelola koperasi) yang ahli dan memiliki pengetahuan tentang ilmu ekonomi, berwatak dan trampil. Pimpinan Koperasi Unit Desa haruslah memiliki orang sendiri yang memiliki harga diri dan kesadaran berkoperasi yang tinggi. Kita sebenarnya jangan terlalu tergesa-gesa bertemu koperasi / Koperasi Unit Desa, jikalau tenaga pimpinan seperti disebutkan di atas belum ada atau belum tersedia. Namun kita sudah terlanjur mendirikan sangat banyak koperasi / Koperasi Unit Desa. Oleh karena itu, maka sekarang ini adalah tempat yang sangat sulit untuk berpacu dan bekerja keras mendidik dan

memenangkan sebanyak mungkin kader-kader pimpinan koperasi yang ahli di bidang ekonomi / perkoperasian, b karakter, memerlukan harga diri dan pemeliharaan berkoperasi yang u gi, trampil dan lincah dalam mengemudikan bahtera koperasi kepada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Instruksi Presiden no. 2 tahun 1978 tanggal 6 Februari Koperasi Unit Desa. Maksud pemerintah agar Mengusahakan Koperasi Unit Desa atau KUD mampu menjadi pusat pelayanan jasa perekaman-ianian pedesaan yang berdayaguna dan berhasilguna. Demikian pula untuk memantapkan dan menumbuhkan swadaya Unit Koperasi Desa serta mendukung pembangunan dasar Koperasi Unit dapat memfasilitasi itu, Koperasi sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi yang memerlukan manajemen atau ketenagakerjaan yang dapat membantu, tidak hanya kelancaran dan berhasilnya tersedia bantuan juga usaha-usaha yang dijalankan, yang menjamin Koperasi yang disetujui, yaitu memenuhi kebutuhan anggota dengan cara yang tidak menyimpang dari asas-asas perkoperasian. Karena sesuai dengan hakikinya Koperasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota, maka tugas Koperasi yang berbeda dari badan yang meminta untuk memberikan (layanan) kepada anggota-anggota yang semurah mungkin, selancar mungkin, dan mungkin mungkin, Dr. G. Fanquet menggolongkan Koperasi dalam perusahaan pemberi jasa (pengabdian layanan) sebagai lawan dari PT, CV, dan sebangsa itu motif pembentukannya untuk mencari tanpa tanda jasa. Perusahaan ini digolongkan dalam usaha pengejar keuntungan (Untung undianaking Perbedaan yang jelas untuk sifat-sifat hakiki dari masin masing-masing jenis perusahaan di atas (Koperasi dan PT) dapat dikemukakan contoh klasik yang diberikan oleh Sombart. Mengs mukakan, cari tahu kapitali adalah dengan penjualan sepatu mencari untung tanpa memperdulikan siapa yang membeli sepatu itu. Yang penting dengan pembuat sepatu bisa untung. Adalah nomor dua atau akibat yang timbul lantaran pemberian jasa, yang sebenarnya bukan menjadi pendukung. Maka dari itu apa yang ada di PT-PT. Keberhasilan pembelian pada Koperasi dinamakan penerimaan-penerimaan hasil usaba (surplus), sebab ditanyakan tentang pembayaran yang dibutuhkan atau diterima yang kurang dari anggota, jadi wajar pula luangkan setiap-tahun tutup buku. Jika demikian, pilihlah ketatalaksanaan yang diizinkan yang berhasil di Koperasi.

Pada PT dan lain-lain, berhasil manajemen adalah dalam jumlah besar yang diterima oleh masing-masing saham setiap tahun. Tambah lebih banyak dari Tambah

ditambahkan ke hasil pelaksanaan. Keadaan pada Koperasi adalah berbaring. Ukuran dari berhasilnya Koperasi berarti jumlah besar (dalam jenis dan volume) Maka dari itu, merupakan suatu yang penting dari Koperasi untuk menarik perhatian dan keaktifan guna guna menarik perhatian yang maksimal untuk mensukseskan usaha Koperasi. Berkaitan dengan hubungan antara anggota dan Koperasi merupakan ukuran besar yang berhasil mencapai Koperasi. Atau dengan kata lain, kesadaran anggota merupakan kekuatan potensial dari Koperasi. Barangkali sebagai hasil dari partisipasi dan kebutuhan akan jasa timbul pengorbanan-pengorbanan materiil / keuangan yang dibeli oleh Koperasi dari anggota anggotanya. Tegasnya tambah besar dan banyak layanan yang diharapkan dari anggota dalam bentuk yang dibayarkan atau permodalan. Di sinilah dan kedudukan modal dalam perkumpulan Koperasi dibandingkan dengan modal pada PT. Sehingga dalam Koperasi Jasa adalah primer, sedangkan modal yang diharapkan dari anggota sekunder, Dari itu yang utama dalam Koperasi adalah anggota-anggota yang memeriksakan layanan sementara modal yang memiliki kedudukan nomor dua, Berhubungan berhasilnya usaha Koperasi lain kontribusi partisipasi anggota maka merupakan usaha yang penting dari Koperasi untuk member kesadaran dan menumbuhkan keyakinan anggota terhadap cita-cita dari perkumpulan Koperasinya. Hal itu dilakukan melalui apa yang disebut hubungan keanggotaan.

## **2. KONSEKUENSI MANAJEMEN KOPERASI**

Konsekuensi manajemen Koperasi yang mengutamakan demokrasi adalah membina dan mengembangkan kecerdasan anggota khusus dan anggota masyarakat yang khusus membahas tata kehidupan koperasi sendiri.

Di dalam demokrasi dituntut pengetahuan dan kecerdasan anggotanya tentang hal-hal yang meminta hakikat dan kewajiban sebagai anggota, isi dan makna Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang menjadi peraturan permainan semua hubungan demokrasi di semua organisasi. Demokrasi tidak akan tumbuh lebih tinggi jika anggotanya tidak dapat memenangkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama.

Pembinaan anggota dalam kerangka menegakkan sifat demokrasi dalam tata kehidupan koperasi terletak pada dua pihak sebagai kutub-kutub magnet yang saling menarik-menarik.

Pengurus sebagai pihak pertama merupakan magnet kutub utara yang pertama dan utama yang harus diputar untuk memutar dan memutar pihak anggota sebagai kutub selatan.

Rangsangan-rangsangan partisipasi pihak di dalam koperasi baru muncul jika Pengurus menggunakan semua forum komunikasi seperti Rapat-rapat Anggota Dewan, untuk tiba dan memenuhi prinsip-prinsip rapat. Di samping itu saluran-saluran komunikasi dibuka selebar-lebarnya dengan menggunakan alat komunikasi ala seperti khusus, pengumuman-pengumuman, surat edaran dan kotak saran-saran. Jika forum komunikasi dan saluran alat sudah diputar, maka informasi yang masuk baik benin saran atau kritik, perlu mendapat tanggapan dan perbaikan yang memuaskan dalam arti yang luas-luasnya. Jika hal ini sudah ditanggapi dan ternyata memuaskan anggota akan lahirlah magnet baru yang lebih besar dan kuat dan ditanggapi penuh kegairahan dan keikutsertaan anggota dalam semua kegiatan di tata kelola Koperasi itu akan lebih meningkat.

Kenyataan sebaliknya dan banyak menjadi menantang adalah penggunaan forum-forum komunikasi dan saluran serta alat-alat komunikasi itu. Rapat-rapat anggota sering digunakan sekedar memenuhi persyaratan peraturan. Saluran komunikasi tertutup dan alat-alatnya tidak bisa digunakan. Berbagai saran dan kritik yang dilontarkan anggota baik melalui surat atau teguran langsung tidak mendapat tanggapan yang wajar, dan disetujui anggota menjadi apatis dan dengan demikian bekerja di Koperasi akhirnya terbatas hanya pada Pengurus saja; itu pun hanya beberapa orang saja.

Di dalam Rapat Anggota Koperasi senang para anggota Koperasi bodoh. diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-demi hak kebebasan demokrasinya dan jujur juga mendukung saran dan gagasan-keberhasilannya demi perbaikan, kemajuan dan pengembangan Koperasi sebagai wahana yang terbaik untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Jikalau para anggota Koperasi Unit Desa (KUD), terutama para pemimpinnya, termasuk para pemimpin Puskud-puskud / Inkudnya karena memiliki harga diri dan kesadaran berkoperasi yang tinggi, maka dapat diharapkan Koperasi Unit Desa (KUD) akan membantu aktif dan positif di dalam Anggaran pedesaan yang menjadi tulang punggung masyarakat Indonesia. Jikalau para pemimpin Koperasi Unit Desa (KUD) termasuk para pemimpin Puskud-puskud / Inkudnya bekerja dengan dedikasi penuh serta ikhlas tulus untuk cita-cita Koperasi, maka dapatkah disediakan bangsa

Indonesia yang adil dan makmur melalui Pancasila dan Undang-Undang Terkait 1945 akan menjadi kenyataan dan bukan hanya impian yang menghambat belaka. Jika organisasi dan tata kerja Koperasi Unit Desa sudah baik, sempurna dan mantap, maka Koperasi Unit Desa insya Allah akan mampu mempercayakan kehidupan dan meningkatkan taraf hidup serta kehidupan ekonomi rakyat Indonesia yang miskin.

Kesimpulannya, fakta dan fakta kerja dan tata kerja Koperasi Unit Desa sudah baik, sempurna dan mantap, jika KUD / Puskud / Inkud sudah digabungkan dan dikelola oleh orang-orang yang sibuk, berdedikasi, berwatak, harga diri tinggi dan berkeringat, maka insya Allah Koperasi Unit Desa akan mewujudkan cita-cita perjuangan rakyat Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, sebagai organisasi dan kekuatan ekonomi yang berakar serta berpangkal di desa, Koperasi Unit Desa akan meraih kemenangan di bidang ekonomi yang sangat didambakan dari desa.

Rakyat Indonesia bercita-cita membangun ekonomi nasionalnya yang akan membawa kemakmuran dan juga tidak hanya untuk satu orang atau satu golongan saja, akan tetapi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jangan hanya mempergunakan kedok nasional untuk melakukan a-nasional dengan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kepentingan rakyat banyak yang masih menderita hidupnya.

### **C. MASALAH ANGGOTA DALAM MANAJEMEN KOPERASI**

Masalah anggota dalam Manajemen Koperasi, merupakan masalah yang sangat penting. Berbeda dengan bentuk usaha yang berdasarkan kumpulan modal, di mana anggota pemiliknya tidak masuk di bidang manajemen. Pada Koperasi, masalah anggota meminta perhatian manajemen yang lebih besar. Hal ini jelas, karena Koperasi adalah konsentrasi anggota, bukan konsentrasi modal pemiliknya. Dalam Koperasi usaha dan organisasi diurus bersama oleh anggota. Usaha anggota dan usaha Koperasi tentang masing-masing anggota menjadi pelanggan kepada Koperasi, dan usaha Koperasi bagian-bagian dari usaha anggota. Oleh sebab itu kekuatan dari Koperasi bergantung pada kualitas dan kualitas anggota Koperasi itu masing-masing.

Koperasi adalah organisasi golongan masyarakat yang potensi ekonominya lemah. Ini bukan berarti pemilik modal tidak boleh menjadi anggota Koperasi, akan tetapi logis dan praktiknya orang yang memiliki modal tidak memilih Koperasi



sebagai wadah perjuangan ekonominya. Oleh sebab itu, dapat diterima menjadi anggota Koperasi adalah mereka yang memiliki persyaratan-persyaratan:

1. anggota masyarakat yang memiliki usaha.
2. usaha terkait dengan usaha Koperasi.
3. anggota masyarakat.
4. mampu melaksanakan hak dan memikul tanggung jawab sebagai anggota.
5. Mempunyai rasa individualistis, solidaritas, outoaktivitas.

Karena itu masalah anggota di dalam suatu Koperasi meliputi:

1. Diperbarui anggota Koperasi.
2. meningkatkan kualitas anggota.

Masalah anggota yang demikian relevan dengan prinsip kerja Koperasi yang terletak pada kualitas dan jumlah anggotanya Koperasi harus meningkatkan jumlah anggotanya. jadi mencapai jumlah efisien. Jumlah yang disetujui adalah 500-600 anggota Setiap Koperasi. Jika batas ekonomis sudah ditentukan, perlu segera diadakan jumlah anggota.

Untuk mendukung jumlah anggota yang perlu berpedoman pada sikap seseorang memandang organisasi berdasarkan pada persepsi orang itu sendiri terhadap organisasi.) Koperasi sering diartikan sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan menyelenggarakan usaha bersama melalui pembentukan suatu perkumpulan yang diawasi secara demokratis.

Dari pengertian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa Koperasi itu memiliki 2 (dua) aspek utama, aspek perkumpulan orang yang tergabung di dalam Koperasi adalah mereka yang tentunya sudah benar-benar memahami arti dan tujuan Koperasi serta asas dan sendi dasarnya. Sebagai anggota Koperasi, haruslah memiliki kepentingan seperti kepentingan pribadi yang diutamakan, sepantasnya kepentingan bersama. Kemudian, apabila dilihat dari aspek usahanya, maka pengelolaan usaha Koperasi pada prinsipnya tidak berbeda dengan usaha bukan Koperasi, yaitu harus efisien dan lugas serta dilandasi dengan hukum-hukum ekonomi. Dengan kata lain, usaha Koperasi harus dikelola secara profesional. Sebagai badan usaha, Koperasi harus mampu bersaing dengan usaha-usaha bukan Koperasi, sehingga anggota tidak tergoda untuk mencari pelayanan dari pihak lain.

Untuk mencapai sasaran yang baik dalam bidang organisasi (perkumpulan) maupun dalam bidang usaha seperti dikemukakan di atas yang diperlukan, terus-

menerus, konsisten dan berkesinambungan, yang tidak lain adalah pendidikan. Dengan demikian pendidikan di dalam Koperasi yang memberikan pemahaman dan kesadaran Koperasi di dalam keanggotaan pada umumnya (termasuk Pengurus, BP, dan sebagainya) serta untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki para petugas yang bertugas bidang usaha. Melalui pendidikan yang dilakukan dengan baik, maka dapat diharapkan Koperasi akan dapat menjalankan fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pendidikan dalam kegiatan belajar ini memiliki arti yang luas, yaitu meliputi: membahas, latihan maupun penyuluhan. Pengertian dalam arti luas ini juga terkandung pada istilah "dana pendidikan Koperasi" yang disetujui pada UU No. 12 / 1967.2) Dengan kontribusi "Pendidikan Koperasi" ini, Anda akan menemukan berbagai sumber tentang pendidikan yang dijalankan oleh Koperasi, seperti: Peranan pendidikan dalam kehidupan Koperasi, Koperasi jenis-pendidikan, sumber dana pendidikan Koperasi, koperasi pendidikan, menggunakan dan metode yang tepat guna dalam pendidikan Koperasi dan pengelolaan program pendidikan Koperasi di Indonesia.

Dengan hadirnya Pengurus dan Badan Pemeriksa yang terdiri dari anggota cerdas, yang dipilih secara demokratis maka pengelola koperasi Koperasi diharapkan dapat berjalan dengan sehat pula. Bila sudah tiba, usaha-usaha yang dikelola dikembangkan secara profesional dan diperlukan manajer, maka usaha juga dapat dikembangkan dengan baik.

Dari uraian tersebut di atas, maka keberhasilan Koperasi dalam pencapaian akan banyak ditentukan dari pengetahuan, penghayatan dan kesadaran berkoperasi para anggotanya. Dan hal ini hanya mungkin dicapai melalui pendidikan anggota. Juga dari uraian ini di atas dapat kita ketahui tentang pendidikan ini bukan hanya masalah ideologi Koperasi hanya yang mendukung juga masalah usaha, karena memang pada hakikatnya Koperasi adalah lembaga ekonomi yang harus berurusan dengan hukum-hukum ekonomi pula. Karena itu masalah pendidikan usaha ini tak kalah penting dengan pendidikan dalam bidang organisasi atau ideologi.

Mengenai pendidikan Koperasi ini, Dr. Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama dan Bapak Koperasi Indonesia, pernah mengatakan bahwa tidak begitu mudah membangun dan mengelola Koperasi. "Lebih mudah ikut serta pada PT, karena anggota yang terbanyak tinggal bersama, sedangkan pimpinan dan pengurus menerima orang lain saja. Anggota yang hanya ingin tahu dengan pembagian keuntungan saja

habis tahun. Membangun dan mengemudikan Koperasi lebih sukar, karena Semua anggota harus ikut serta dengan aktif dan dengan keinsyafan untuk memajukan Koperasinya, Anggota-anggota Koperasi harus memiliki cita-cita untuk membeli kepentingan bersama, harus insyaf akan harga yang diminta dan percaya pada kesanggupan bersama-sama dalam membela nasib bersama. Mereka harus yakin, dengan berkoperasi mereka dapat mengangkat derajat mereka sebagai manusia. Sebab itu Koperasi menghendaki pendidikan dan latihan, yang tidak laksana dalam waktu singkat, malahan menghendaki waktu berpuluh tahun ", demikian Bung Hatta.

Masih tentang pendidikan dalam Koperasi ini, Bung Hatta, bahkan pernah menghasilkan semboyan yaitu: "Mendidik Koperasi dan Koperasi Mendidik". Jika dalam uraian awal, disetujui anggota perlu dididik agar memiliki pengetahuan dan kesadaran berko- maka jika kita sudah berkoperasi, kita pun akan menemukan pendidikan moral yang dilakukan oleh Koperasi untuk para anggotanya.

Jika perkumpulan Koperasi merupakan kumpulan orang (kelompok) yang memiliki tujuan usaha bersama-sama meningkatkan pelayanan yang dapat ditingkatkan dalam memenuhi keperluan anggotanya. Maka dengan adanya pelayanan (layanan) yang lebih baik maka kedudukan anggota dalam bidang usaha masing-masing menjadi lebih kuat.

Dengan berkoperasi, maka masing-masing mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan memperoleh kedudukan dalam pasar yang relatif kuat melalui volume usaha. Ruang terbatas usaha Koperasi tidak terbatas pada anggota-anggota saja. Suatu Koperasi tidak akan menghilangkan sifat-sifat Koperasi, manakala Koperasi itu juga melayani kepentingan bukan anggota hingga masyarakat merasakan keuntungan keberadaan Koperasi di antara mereka.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah keuangan dari perorangan Koperasi berarti lebih dari harus melihat asas-asas perusahaan yang rasional, dan juga diamati apa yang terjadi di dalam kegiatan sosial sebagai lingkungan kegiatan usaha. Hal ini menjadi pertimbangan penting Koperasi dalam sistem pasar yang membahas tentang orang yang monopolistik. Dalam sistem ini, Koperasi dalam hubungan dengan anggotanya merupakan perusahaan yang menghubungkan anggota dengan pasar. Untuk meningkatkan daya guna dalam tata ekonomi yang berkompetisi dengan pesaing, Koperasi senantiasa berusaha mengurangi mata rantai perdagangan. Dengan berkoperasi, para pelanggan berusaha untuk bergabung dalam satu organisasi

dan secara langsung menghubungi sumber produksi, tanpa harus melalui lembaga niaga yang ada di masyarakat.

#### **D. MANUSIA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR PENTING DALAM MANAJEMEN**

Menurut Drs. P. Hasibuan, Setiap bentuk usaha termasuk koperasi, harus berpegang pada fungsi-fungsi manajemen, dalam rangka melakukan fungsi-fungsi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan masing-masing. Adapun fungsi-fungsi tersebut antara lain:

##### **a. Planning (Merencanakan)**

bahwa untuk merencanakan suatu rencana harus terlebih dahulu ditentukan berdasarkan tujuan tersebut, sebab jika tidak demikian kegiatan yang bisa dijalankan sendiri. Jika tujuan (objektif) ditentukan, sebaiknya digariskan digariskan kebijaksanaan, strategi dan taktik untuk menentukan tujuan itu. Penentuan tujuan dan strategi yang dilakukan menurut metode dan teknik-teknik seperti teknik mengambil keputusan dan teknik pelaksanaannya.

##### **b. Pengorganisasian.**

Sejalan dengan tujuan yang perlu direncanakan untuk mencapainya, segera dirumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan Jenis kegiatan dan unsur-unsur manajemen yang ikut berfungsi di dalam kegiatan itu. Karena itu setiap unsur manajemen yang turut berada di dalamnya harus mempunyai wewenang dan tanggung jawab, serta dinamika bertanggung jawab dan tanggung jawab yang dimaksud secara vertikal maupun horizontal. Bagi Koperasi fungsi-Tunggal usahanya tidak hanya meliputi fungsi-fungsi usaha bentuk kumpulan modal tetapi juga termasuk pembinaan anggota. Maka untuk memahami pengorganisasian dalam usaha koperasi, harus diperhatikan hubungan antara unsur-unsur manajemen, fungsi koperasi dan fungsi fungsi perusahaan. personalia, fungsi akuntansi, fungsi administrasi yang harus ada untuk Fungsi pembelanjaan, fungsi produksi, fungsi pemasaran-fungsi Anda mencapai tujuan koperasi, harus ditentukan dan ditetapkan penanggulangan tanggung jawabnya serta berwenang yang berwenang di antara manajemen koperasi yang ada sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing.

Pengorganisasian dengan demikian merupakan fungsi manajemen yang menentukan kewenangan dan tanggung jawab yang bertanggung jawab dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi usaha Koperasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan baik secara regional. maupun vertikal.

**c. Mengarahkan**

Masing-masing individu yang telah ditentukan fungsi dan jabatan-jabatan yang melakukan kegiatan-kegiatan organisasi belum tentu bekerja sebagaimana diharapkan jika tidak dikomunikasikan dalam berbagai cara seperti perintah-perintah atau dengan motivasi tertentu. Pada hakikatnya dengan mengarahkan adalah usaha-usaha komunikasi yang membuat semua pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi untuk bekerja sesuai dengan rencana.

**d. Koordinasi**

Jika tiap individu yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dimotivasi dan diberi petunjuk atau pelaksanaan pelaksanaannya, maka upaya dilakukan secara selanjutnya yang membuat individu-individu itu bekerja secara terpadu baik secara horizontal maupun vertikal menuju sasaran organisasi. Pada hakikatnya Koordinasi atau koordinasi ada hubungan kerja yang serasi, bertugas diberbagai bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk menciptakan hasil nyata bagaimana direncanakan sebelumnya. Selagi anggota Koperasi masih sedikit dan usahanya masih kecil. Koordinasi dapat ditemukan dengan pertemuan tatap muka dengan individu-individu yang berada di dalam koperasi, tetapi jika sudah siap, apalagi pertemuan tatap muka tidak lagi dapat dilakukan.

**e. Controlling**

Planning merupakan rumusan kegiatan yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan sumber yang telah tersediaan yang dapat dirasakan. Dalam praktek tidak semua apa yang sudah dilaksanakan bisa terlaksana sepenuhnya karena munculnya berbagai hambatan yang belum diperkirakan sebelumnya. Berbagai penyimpangan yang baik disengaja maupun tidak selalu terjadi. Kelambatan penyediaan bahan kesediaan persiapan tenaga kerja dan kemampuannya dan lain-lain sering menghambat terlaksananya semua rencana sepenuhnya. Untuk

mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja agar dapat diambil langkah yang berguna untuk menvegah kerugian yang berkelanjutan, begitu juga untuk memulai keunggulan rencana yang telah dibuat, langkah manajemen selanjutnya adalah melaksanakan pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berlarut-larut sehingga segera dapat diatasi. Antara perencanaan dan pengawasan tertanam suatu ikatan yang erat karena tanpa rencana yang ada pengawasan tidak mempunyai arah. Sebaliknya suatu rencana tanpa pengawasan bisa menjuruskan organisasi kejurang malapetaka yang tidak dapat ditarik lagi. Dalam hubungan inilah jika didalam koperasi sejalan dengan dibentuknya pengurus serentak pula dipilih Badan Pemeriksa yang kedudukanya terhadap anggota sama.

#### **E. MANAJEMEN UNTUK MENINGKATKAN KESEJATERAAN**

Sumber- sumber pembelajaran yang kurang lancer atau kurang baik merupakan hambatan bagi Koperasi. Sebagian besar dari anggota- anggotanya mempunyai penghasilan yang rendah, keadaan ini menyebabkan Koperasi mengalami kesukaran karena pembelanjaanya yang kurang sehat dan terpaksa menerima kebijaksanaan untuk menunda pembayaran pada anggota produsen. Efektivitas dan efisien usaha Koperasi dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu:

##### **a. Efisiensi Proses Usaha**

Sebagai bentuk usaha Koperasi pun harus melaksanakan fungsi perusahaan secara efisien. Fungsi- fungsi yang dimaksud adalah fungsi pembelanjaan, fungsi produksi, fungsi pemasaran, personalia, akuntansi dan fungsi administrasi.

##### **b. Loyalitas Anggota**

Loyalitas anggota tercermin pada kestiaan anggota sebagai pelanggan Koperasi memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak keanggotaan dalam segala bentuk kegiatan didalam tata kehidupan Koperasi. Ketertiban anggota untuk melunasi simpanan wajib saja belum dapatdijadikan ukuran

untuk menilai loyalitas anggota apalagi didalam Koperasi fungsional yang simpanan wajibnya langsung dipotong koperasi dari gajinya.

**c. Penawaran yang cukup**

Barang-barang yang dibutuhkan anggota ataupun kepentingan lainnya yang sesuai dengan bidang usaha Koperasi yang bersangkutan hendaknya cukup tersedia di Koperasi sehingga mereka tidak perlu mencarinya diluar Koperasi karena jika keperluan anggota tidak tersedia di koperasi tidak boleh tidak mereka harus membelinya diluar Koperasi.

**d. Persaingan**

Keberadaan bentuk usaha lain disekitar Koperasi memaksa Koperasi untuk bersaing. Karena itu Koperasi harus peka terhadap pengaruh- pengaruh persaingan itu dalam upaya mengendalikan usahanya. Koperasi tidak bisa menentukan sendiri harga barang- barang dan jenis barang yang dijual di Koperasi karena secara psikologis setiap individu selalu berusaha untuk menentukan pilihannya terhadap barang- barang yang dibutuhkan mereka.

**e. Harga Eceran**

Perbedaan harga eceran di Koperasi dengan harga eceran dipasar merupakan salah satu sumber Koperasi untuk meningkatkan tabungan anggota Koperasi. Apabila koperasi dapat membeli dengan harga eceran yang lebih murah di pasar dan menjualnya dengan harga eceran Koperasi yang lebih tinggi maka selisih harga eceran keduanya akan menjadi tabungan anggota didalam Koperasi.

## **BAB XI**

### **PERMODALAN DAN PERHITUNGAN SHU KOPERASI**

#### **A. Pengertian, Unsur Pengertian, dan Jenis Koperasi**

Koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi merupakan kerjasama yang bersifat ekonomi. Koperasi berasal dari kata Co dan Operation yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Berarti koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum bekerjasama yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umumnya.

##### **1. Pengertian Koperasi**

Beberapa pakar mengemukakan pengertian koperasi

- a) Menurut International Cooperative Alliance (ICA) buku *The Cooperative Principles* karangan P.E Weraman memberikan definisi sebagai berikut:

Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi.

- b) Bapak Koperasi Dr. Mohammad Hatta

Koperasi adalah bangunan organisasi sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua bertanggung jawab dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

- c) Dalam Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1994 Pasal 1 Ayat 1 sebagai berikut:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.

Koperasi merupakan milik para anggota sendiri diatur sesuai dengan keinginan para anggota. Dalam koperasi tidak ada paksaan dan campur tangan pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi. Pembagian pendapatan benar-benar harus berdasarkan besar kecilnya karya dan jasa anggota.

##### **2. Unsur-unsur pengertian koperasi**



1) Beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Badan hukum adalah suatu badan yang secara hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagai badan / organisasi dapat menuntut dan dituntut.

2) Usaha bersama

Berarti bahwa dalam koperasi pertumbuhan kegiatan usaha didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggota.

3) Asas kekeluargaan

Artinya berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dan kepentingan bersama para anggotanya dalam usaha kerjasama, bantu membantu di antara anggota organisasi dengan pengurus.

4) Kegiatan berdasarkan prinsip koperasi

Koperasi berperan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan koperasi perlu membangun diri menjadi kuat dan mandiri sebagai perekonomian nasional. Koperasi berdasarkan kepentingan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan anggota. Koperasi merupakan system ekonomi yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Usaha peningkatan pembinaan perekonomian harus dijalankan, bersifat menyeluruh dan terpadu.

3. Jenis Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggota. Dasar pengurus sesuai dengan undang-undang koperasi yang berlaku, terdiri atas:

- a. Koperasi konsumenn,
- b. Koperasi produsen,
- c. Koperasi simpan pinjam,
- d. Koperasi pemasaran.

Koperasi umumnya berusaha pada kepentingan yang sama untuk memenuhi kebutuhan anggota. Barang-barang diusahakan dari grosir badan penyalur / pengusaha, sehingga harganya murah setidaknya tidaknya sama dengan harga pasar.

a. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen ialah koperasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumen mempunyai fungsi sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan anggota sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen.

Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan pokok anggota, koperasi konsumen juga mempunyai fungsi-fungsi lainnya, seperti :

- 1) Dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah
- 2) Harga lebih murah atau sama dengan harga pasar
- 3) Kualitas barang lebih terjamin
- 4) Sisa hasil usaha yang diperoleh dikembalikan kepada anggota
- 5) Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri atas pengusaha, pemilik alat-alat produksi, dan karyawan yang berkepentingan, sedangkan usahanya langsung berhubungan dengan bidang industri atau kerajinan. Koperasi produsen umumnya didirikan oleh industri kecil yang bekerja untuk kepentingan bersama menghindarkan diri dari kaum kapitalis

1) Koperasi petani

Koperasi petani ialah koperasi yang anggota-anggotanya atas para petani pemilik lahan pertanian, pemaro atau buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan, sedangkan usaha yang dijalankannya adalah ayng bersangkutan dengan bidang pertanian.

Usaha-usaha koperasi pertanian meliputi:

- a) Penyediaan alat-alat pertanian dan bahan-bahan yang dibutuhkan agar produktivitas bertambah, seperti pembelian bibit unggul, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit.
- b) Mengelola hasil pertanian dari tingkat bahan menjadi hasil siap pakai, misalnya pengelolaan karet, penggilingan padi.
- c) Mengusahakan penjualan hasil pertanian / pemasaran.
- d) Memberikan kredit bagi para anggotanya untuk keperluan produksi pertanian, supaya terhindar dari system ijon.

Potensi koperasi petani diikutsertakan dalam kelompok tani, bimas. Bimas merupakan paduan dari kegiatan baik aparat pemerintah, swasta, dan para petani. Usaha untuk meningkatkan swadaya masyarakat petani dengan saptakarya pertanian yang meliputi:

- a. pancausaha,
- b. pembinaan / penguasaan hasil,
- c. pengelolaan hasil,
- d. pemasaran hasil,
- e. pembangunan masyarakat desa,
- f. peningkatan kualitas,
- g. peningkatan kuantitas pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi.

## 2) Koperasi Peternakan

Koperasi peternakan ialah koperasi yang anggotanya terdiri atas pengusaha-pengusaha peternakan, pemilik ternak, dan buruh peternakan atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan usaha peternakan.

Koperasi peternakan dapat didirikan sesuai dengan jenis ternak, misalnya:

- a. koperasi peternakan ayam buras,
- b. koperasi peternakan itik,
- c. koperasi peternakan sapi, kambing dan kerbau.

Koperasi peternakan dapat diusahakan secara bersama dengan pertanian, yang merupakan usaha sambilan. Bila diorganisir secara baik maka akan menciptakan lapangan usaha yang saling menguntungkan.

Bidang-bidang usaha koperasi peternakan meliputi:

- a. Mengusahakan penyediaan bibit unggul, makanan ternak, obat-obatan ternak.,
- b. Penyediaan lahan / tempat untuk memelihara ternak,
- c. Memberikan kredit kepada anggota koperasi,
- d. Mengusahakan penjualan hasil peternakan.

## 3) Koperasi Perikanan

Koperasi perikanan ialah koperasi yang anggotanya terdiri atas para pengusaha pemilik perikanan, para nelayan, dan orang-orang yang berkepentingan dengan bidang perikanan baik usaha perikanan meliputi

bidang:

- a. Penyediaan bibit ikan, alat-alat penangkapan hasil ikan, perahu bermotor bagi anggota;
- b. Pengadaan sarana pengangkutan hasil perikanan;
- c. Pengolahan hasil ikan dengan system mekanik dan ban berjalan;
- d. Mengusahakan pemasaran hasil perikanan untuk anggota maupun masyarakat;
- e. Pemberian kredit bagi anggota.

#### 4) Koperasi Kerajinan dan Industri

Anggota-anggotanya terdiri atas usaha-usaha kerajinan dan pengusaha industri atau orang yang bersangkutan-paut dengan kerajinan dan industri, misalnya koperasi kerajinan tangan, koperasi batik, koperasi ukiran kayu, koperasi industri tekstil, dan koperasi elektronika.

Bidang-bidang usaha koperasi kerajinan dan industri meliputi:

- a. Menyediakan bahan dan alat-alat kerajinan dan industri yang diperlukan;
- b. Menciptakan model-model baru, teknologi mutakhir;
- c. Menggunakan metode atau cara pembuatan hasil yang lebih modern;
- d. Mengusahakan pemasaran hasil;
- e. Menyediakan sarana gedung dan pengangkutan;
- f. Mengusakan kredit bagi anggota.

#### c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam (koperasi kredit) ialah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan. Kegiatan anggota koperasi ialah menabung atau menyimpan, jumlah tabungan yang terkumpul dipinjamkan pada para anggota lainnya yang memerlukan dengan tingkat Bunga yang telah diatur dalam anggaran rumah tangga koperasi.

Bidang-bidang usaha koperasi simpan pinjam meliputi:

- 1. Menerima uang simpanan dari anggota koperasi;
- 2. Melayani pinjaman anggota.

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah:

1. Membantu keperluan kredit para anggota yang memerlukan;
2. Mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga dapat membentuk modal;
3. Mendidik para anggota untuk hidup teratur dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka;
4. Menambah pengetahuan dan informasi tentang perkoperasian.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang usaha untuk pemasaran barang dan jasa.

Tujuan koperasi pemasaran adalah:

1. Membantu dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan anggota;
2. Memberikan pelayanan terhadap anggota dalam cara meningkatkan jumlah dan mutu barang yang layak untuk dipasarkan kepada konsumen;
3. Memperlancar arus barang dari produsen kepada konsumen;
4. Menambah pengetahuan usaha pemasaran hasil produksi.

e. Koperasi Jasa

Selain kegiatan di bidang usaha sebagai sarana produktif juga perlu kegiatan di bidang usaha jasa. Meningkatnya kegiatan usaha dan keanekaragaman kebutuhan menyebabkan tumbuhnya jenis koperasi yang khusus bergerak di bidang pelayanan jasa. Sebagai pelengkap kegiatan usaha koperasi jasa, orang memerlukan jasa pengangkutan agar dapat sampai ke tempat tujuan.

Koperasi usaha angkutan, seperti Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan, Koperasi Bina Usaha Transportasi RI (kobutri), Koperasi Bandung Tertib (kobanter), Koperasi Angkutan Jakarta (KOPA), Koperasi Asuransi Indonesia (KAI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Listrik, dan Koperasi Usaha Kredit (KUK).

f. Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan untuk masyarakat pedesaan guna meningkatkan pelayanan kepada anggota masyarakat dan masyarakat pedesaan.

Fungsi Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi:

- a. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja / usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan industri / kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya Sembilan bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi / industri dan sebagainya dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
- d. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya.

Tugas Koperasi Unit Desa adalah :

- a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan secara teratur.
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota untuk memajukan usaha.
- c. Memberikan penyuluhan teknik pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha anggota.
- d. Mengadakan penyuluhan, pengolahan pergudangan, dan menyelenggarakan pemasaran hasil-hasil Negara.
- e. Mengadakan atau menyalurkan barang-barang konsumsi keperluan anggota.
- f. Menambah pengetahuan perkoperasian anggota.

## **B. Pemodalan Koperasi**

Ada beberapa prinsip yang harus oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan, yaitu:

1. Pengendalian dan permodalan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan seseorang anggota-anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
2. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usah yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.
3. Kepada modal hanya dibalas jasa yang terbatas.
4. Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien.
5. Usaha-usaha koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) dan tidak membagikan kepada semua anggota. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) pada umumnya menahan lebih dari separuh dari keuntungan ini (setelah dikurangi pajak) untuk ditanamkan kembali dalam usaha-usaha. Pembiayaan usaha koperasi ini dengan menggunakan modal yang diperoleh secara demikian ini, akan meringankan beban biaya modal. Kepada saham-saham koperasi di Indonesia ekuivalen dengan simpanan pokok) tidak bisa diberikan satu premi diatas nilai nominalnya, meski seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah.

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan hibah dari anggota atau dari masyarakat. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan surat-surat lainnya serta sumber lain yang sah.

### **1. Modal Sendiri**

Yang dimaksud dengan modal sendiri dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 25 tahun 1992 adalah yang menanggung resiko atau disebut dengan modal ekuity.

#### **1) Simpanan Pokok**

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

## 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan yang tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

## 3) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi.

## 4) Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia. Modal koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang (baik sebagai anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi) yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap. Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari pemberi hibah dapat dilakukan seketika, karena penyerahan hak milik atas benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan (*hand to hand*). Untuk penyerahan benda tetap dilakukan melalui syarat hukum tertentu untuk sahnyanya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap.

## 2. Modal Pinjaman

Pengembangan kegiatan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b. Koperasi lain/atau anggotanya: pinjaman dari koperasi lain/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya: Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan



khusus, koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama.

- d. Penelitian Obligasi Surat Hilang Lainnya. Obligasi adalah surat berharga yang merupakan pengakuan hutang jangka panjang kepada pemegangnya dengan sanggup membayar bunga tetap dan mengembalikan pada waktu yang ditukar. Untuk menerbitkan obligasi harus memenuhi persyaratan dan dapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- e. Sumber Lain Yang Sah. Pinjaman bersumber lain yang sah biasanya diperoleh dari pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu.
- f. Modal Penyertaan, selain modal sendiri dan pinjaman koperasi dapat memperluas usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang berasal dari pemerintah dana atau masyarakat. Pada hakekatnya modal penyertaan merupakan modal pinjaman yang dalam hal menanggung resiko diperlukan sebagian dari modal sendiri (equity).

a) Modal Penyertaan dari Pemerintah.

Modal penyertaan dari pemerintah termasuk BUMN merupakan salah satu bentuk bantuan kepada koperasi yang berpotensi. Untuk menjaga agar modal penyertaan digunakan sebagaimana semestinya, pemerintah dapat mengikut sertakan wakilnya dalam pengelolaan unit usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah usahanya berjalan lancar, modal penyertaan secara berangsur dapat ditarik kembali.

b) Modal Penyertaan Bukan dari pemerintah

Kecuali dari pemerintah, modal penyertaan dapat berasal dari lembaga swasta dan perorangan. Penggunaan modal penyertaan merupakan salah satu usaha koperasi untuk memperkuat susunan modal equity yang ikut menanggung resiko dalam rangka mengembangkan usaha. Penempatan modal diikat dengan perjanjian antara penanaman modal dan koperasi yang bersangkutan, ditinjau dari pihak peserta penanaman modal penyertaan dalam koperasi merupakan

suatu investasi untuk mendapatkan imbalan jasa. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak penanama modal diberi hak dan kewajiban:

- a. Hak atas asasi jasa modal penyertaan dengan sistem bagi hasil atau dengan pembayaran bunga tetap.
- b. Kewenangan untuk ikut dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dan pengawasan dengan jalan menempatkan wakilnya di unit usaha koperasi yang dibiayai dengan modal penyertaan.

Terkait dengan perjanjian tersebut, dapat diadakan kesempatan apakah modal penyertaan akan ditanam secara terus menerus (tetap) atau dapat dikembalikan setelah koperasi berhasil menghimpun modal sendiri secukupnya.

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.
3. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya dan/atau anggotanya. Bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan suber lain yang sah.

Penumpukan modal dari penyertaan, bisa yang bersuber dari pemeritah maupun dari masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama dalam bentuk investasi, pemilik modal, penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun, demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaanya sesuai dengan perjanjian.

Pasal 42 Undang-Undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa:

1. Selain modal sebagaimana dimaksudkan pasal 41, koperasi dapat pula melakukan penumpukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
2. Ketentuan mengenai penumpukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan pertaturan pemerintah.

Meskipun UU No. 25 tahun 1992 telah memberikan keleluasan pengembangan modal kepada koperasi, namun dalam pelaksanaannya perlu diwaspadai agar pengelolaan dan pengawasannya tetap berada di tangan para anggota koperasi sesuai demokrasi kooperatif. Pemberian keleluasan tanpa batas kepada modal penyertaan bisa membahayakan eksistensi koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dicari pola kerjasama anatar koperasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik modal ingin agar uang yang ditanam dalam koperasi sebagai modal penyertaan tersebut aman, dalam arti tidak akan hilang dan wajar kalau pemilik modal ingin mengawasinya.

### **C. Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.**

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

#### **1. Cara Menghitung Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.**

Sisa hasil usaha (SHU) koperasi seringkali diartikan keliru oleh pengelola koperasi, SHU koperasi dianggap sama saja dengan deviden sebuah PT, terminology SHU jelas, bahwa SHU adalah “Sisa” dari usaha koperasi yang diperoleh setelah kebutuhan anggota terpenuhi dalam manajemen Koperasi Sisa Hasil Usaha (SHU) memang diartikan sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya (total cost [TC]) dalam satu tahun buku. Bahkan, jika ditinjau pengertian SHU dari aspek legalistik, menurut UU No. 25 tahun 1992, tentang perkoperasian, Bab 9, pasal 45 adalah sebagai berikut:

- a. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. SHU koperasi setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota

- c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan pada rapat anggota

Pengertian diatas harus dipahami bawa SHU bukan deviden seperti PT tetapi keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi anggota koperasi, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan koperasi. Artinya, semakin besar transaksi (usah modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana dividen yang diperoleh pemilik saham adalah proposional, sesuai besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku yang dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU tersebut setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota koperasi sebanding dengan jasa-jasa masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Menurut ketentuan UU No. 25 tahun 1992 pasal 45 SHU koperasi digunakan untuk:

- a. Dana Cadangan
- b. Jasa Untuk Anggota
- c. Dana Pendidikan
- d. Keperluan lain-lain.

Pada umumnya presentase pembagian SHU ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Namun mengingat situasi dan kondisi suatu koperasi dari tahun ke tahun dapat mengalami perubahan, maka Rapat Anggota dapat mengadakan ketetapan lain. Hal ini akan dibahas secara berurut sebagai berikut:

- a. Dana Cadangan

Dana cadangan yang dipisahkan dari SHU merupakan salah satu sumber pemupukan modal sendiri yang penting. Apabila Anggaran Dasar tidak dapat menentukan lain, presentase penyisihan dana cadangan ditentukan oleh Rapat Anggota sesuai dengan situasi dan kondisi koperasi pada waktu lain. Misalnya

untuk memperkuat modal koperasi pada tahun-tahun pertama, Rapat Anggota dapat memutuskan 30% dari SHU dijadikan dana cadangan. Setelah jumlah modal sendiri memadai, penyisihan dana cadangan disesuaikan dengan keperluan koperasi dan kepentingan anggota.

b. Jasa Untuk Anggota

Jasa anggota mengandung dua unsur, yakni:

- a) Partisipasi anggota dalam kegiatan. Pada dasarnya transaksi usaha dengan bukan anggota tidak masuk dalam pengertian partisipasi anggota dalam kegiatan usaha. Namun, karena transaksi usaha dengan bukan anggota menggunakan modal yang dihimpun dari anggota, maka sewajarnya apabila sebagian dari sisa hasil yang diperoleh dibagikan kepada anggota seimbang dengan partisipasinya dalam permodalan.
- b) Partisipasi dalam pembentukan modal simpanan anggota diluar simpanan pokok dan simpanan wajib misalnya simpanan sukarela tidak masuk dalam pengertian modal sendiri. Apabila simpanan sukarela belum diberikan imbalan jasa bunga, maka simpanan sukarela tersebut dapat diperhitungkan sebagai partisipasi anggota dalam pembentukan modal.

c. Dana Pendidikan

Pendidikan perkoperasian merupakan salah satu prinsip koperasi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, baik kalangan anggota maupun pengurus atau pengawas. Untuk itu, disamping biaya yang disediakan dalam anggaran belanja perlu dibentuk dana pendidikan yang disisihkan dari SHU.

d. Keperluan Lain-lain

Keperluan lain yang penting untuk diperhatikan dan diatasi dengan SHU diantaranya adalah: insentif bagi pengurus/pengawas, insentif bagi karyawan, dan dana bantuan sosial. Insentif perlu diberikan untuk mendorong kegiatan agar dapat mencapai hasil yang lebih besar. Adapun dana bantuan sosial diperuntukkan bagi pengurus/pengawas, karyawan, anggota koperasi, atau masyarakat yang karena satu sama lain hal dianggap perlu mendapatkan bantuan.

2. Penghitungan SHU Bagian Anggota Dapat Dilakukan Beberapa Informasi Dasar Sebagai Berikut:

- a) SHU total koperasi pada satu tahun buku

- b) Bagian persentase SHU koperasi
- c) Total simpanan seluruh anggota
- d) Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omset) yang bersumber dari anggota
- e) Jumlah simpanan per anggota
- f) Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
- g) Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan. Adapun perlakuan terhadap SHU adalah sisa hasil usaha setelah dana cadangan, dibagikan kepada anggota koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dan untuk besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota koperasi yang kemudian dicantumkan pada Anggaran Dasar suatu koperasi. Tiga pernyataan koperasi yang dikemukakan pada Undang-Undang tentang perkoperasian yaitu UU No. 25 tahun 1992 yang menjadi dasar hukum pembagian SHU koperasi bagi anggotanya. Berikut ini adalah contoh perhitungan pembagian SHU suatu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Misalkan dalam anggaran dasar suatu koperasi ditentukan presentase.

SHU koperasi dibagikan kepada anggota koperasi berdasarkan dari dua kegiatan ekonomi koperasi yang dilakukan oleh anggotanya sendiri, yaitu:

- a. SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima oleh koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

- b. SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi sebagai berikut:

- a) Cadangan koperasi

- b) Jasa anggota
  - c) Dana pengurus
  - d) Dana karyawan
  - e) Dana pendidikan
  - f) Dana sosial
  - g) Dana untuk pembangunan lingkungan
- c. Menurut Hito Tugiman (1990) bahwa pembagian SHU bila diikhtisarkan sebagai berikut:
- 1) SHU-Anggota:
    - a) Anggota
    - b) Cadangan koperasi
    - c) Dana pengurus
    - d) Dana pegawai/karyawan
    - e) Dana pendidikan koperasi
    - f) Dana pembangunan daerah kerja
    - g) Dana sosial
  - 2) SHU Non-Anggota:
    - a) Cadangan koperasi
    - b) Dana pengurus
    - c) Dana pegawai/karyawan
    - d) Dana pendidikan koperasi
    - e) Dana pembanngunan daeran kerja
    - f) Dana sosial

Untuk koperasi Indonesia, dasar hukum bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota adalah pasal 5 ayat 1: UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa *“pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan penimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”*

### 3. Prinsip-Prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.

Telah diuraikan pada teori koperasi bahwa anggota berfungsi ganda yaitu sebagai pemilik (owner) dan sekaligus pelanggan (customer). Sebagai pemilik,

seorang anggota berkewajiban melakukan investasi. Dengan demikian, sebagai investor, anggota berhak menerima hasil investasinya. Di sisi lain, sebagai pelanggan, seorang anggota berkewajiban berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di koperasinya. Agar tercermin asas keadilan, demokrasi, transparansi dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip SHU sebagai berikut:

a) SHU yang dibagi adalah bersumber dari anggota

Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkan untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi.

Pada koperasi yang pengelolaan dan pembukuannya, pada umumnya terdapat pemisahan sumber SHU yang asalnya dari non anggota. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan dalam pembagian SHU adalah melakukan pemisahan antara yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non anggota.

b) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi.

c) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per-anggota dan jumlah SHU yang diberikan kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berupa besaran partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan



terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Selain itu juga untuk mencegah kecurigaan yang timbul antar sesama anggota koperasi.

d) SHU anggota dibayar secara tunai\

SHU yang dibagikan per-anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

### Contoh Pembagian SHU

Pada akhir tahun 2010 suatu koperasi konsumsi memperoleh SHU sebesar 12 juta menurut ketentuan anggaran dasar koperasi tersebut pembagian SHU diatur sebagai berikut:

Dana Cadangan	25,0 %
Jasa Usaha	30,0 %
Jasa Modal	20,0 %
Pengurus/Pengawas	7,5 %
Karyawan	7,5 %
Dana Pendidikan	5,0 %
Dana Sosial	5,0 %

Laporan keuangan koperasi konsumsi diatas untuk tahun buku 2010 antara lain menunjukkan data sebagai berikut :

Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dihimpun dari anggota berjumlah Rp.35.000.000,-

a. Omzet/penjualan yang diperoleh dari :

Partisipasi anggota	Rp. 250.000.000,-
Bukan Anggota	Rp. 150.000.000 ,- +
	Rp. 400.000.000,-

b. harga pokok penjualan Rp. 367.500.000,- -

c. Pendapatan Rp. 32.500.000,-

d. Gaji, biaya, penyusutan, dll. Kewajiban Rp. 18.000.000,- -

e. SHU sebelum pajak Rp. 14.500.000,-

f. Pajak Penghasilan (PPH) Rp. 2.500.000,- -

g. Setelah dipotong pajak **Rp. 12.000.000,-**

**Pembagian SHU**

Dana Cadangan	25% x Rp.12.000.000,-	= Rp. 3.000.000,-	
Jasa Usaha	30% x Rp.12.000.000,-	= Rp. 3.600.000,-	
Jasa Modal	20% x Rp.12.000.000,-	= Rp. 2.400.000,-	
Pengurus/Pengawas	7,5% x Rp.12.000.000,-	= Rp. 900.000,-	
Karyawan	7,5% x Rp.12.000.000,-	= Rp. 900.000,-	
Dana Pendidikan	5 % x Rp.12.000.000,-	= Rp. 600.000,-	
Dana Sosial	5 % x Rp.12.000.000,-	= Rp. 600.000,-	+
			<hr/>
			<b>Rp.12.000.000,-</b>

**Pertanyaan :**

Seorang anggota mempunyai simpanan pokok dan wajib sejumlah Rp. 175.000,- dan berbelanja sebesar Rp. 187.500,-. Berapakah pembagian SHU yang diterima oleh anggota tersebut?

**Jawaban:**

Anggota tersebut menerima

**Jasa Modal**

$$\text{Rp.175.000,-} / \text{Rp.35.000.000,-} \times \text{Rp.2.400.000,-} = \text{Rp. 12.000,-}$$

**Jasa Usaha**

$$\text{Rp.187.500,-} / \text{Rp.250.000.000,-} \times \text{Rp.3.600.000,-} = \text{Rp. 2.700,-}$$

**SHU Yang diterima**

$$\text{Rp. 12.000,-} + \text{Rp. 2.700,-} = \text{Rp.14.700}$$

## DAFTAR PUSTAKA

- Department Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil 1993. Pelatihan Dasar.
- G. Terry. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, edisi revisi. Cetakan I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasmawati, Fifi. 2013. *Manajemen Koperasi*. Medan: Duta Azhar
- Moonti, Usman. 2016. *Bahan Ajar Mata Kuliah: Dasar-Dasar Koperasi*. Yogyakarta: INTERPENA.
- Subandi. 2015. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.
- Subandi. 2017. *Ekonomi Koperasi ( Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.

### 2. Sumber Website:

<https://iinfouu.blogspot.com/2012/11/dukungan-manajemen-terhadap-koperasi.html?m=1>

<http://junetroslina.blogspot.com/2013/03.makalah-manajemen-koperasi.html?m=1>

<https://id.scribd.com/document/405520187/Peranan-Dukungan-Fungsi-Dan-Manajemen-Di-Bidang-Koperasi>

